

Kerangka Penghidupan Berkelanjutan

Sustainable Livelihood Framework



Penulis

Sebastian Saragih
Jonatan Lassa
Afan Ramli

2007

Daftar Isi/Outlines

Pengantar Regional Director Hivos Southeast Asia Office

Pengantar Direktur Eksekutif Circle Indonesia

Pengantar Editor

Pengantar Penggunaan Buku Modul Ini

Daftar Tabel

Daftar Box

Daftar Gambar

Daftar Singkatan

1. Bagian I. Pengenalan Konsep dan Definisi “Penghidupan Berkelanjutan”

- 1.1. Pengenalan Konsep dan definisi
- 1.2. Mengapa Kerangka Kerja?
- 1.3. Ukuran Keberlanjutan
- 1.4. Konsep Inti Kerangka Kerja SL
- 1.5. Bagaimana Hubungan Kerangka Kerja SL dengan Pendekatan lain ?
- 1.6. Apa yang beda dari SL?
- 1.7. Bagaimana Kerangka Kerja ini Digunakan ?
- 1.8. Pada tahap apa seharusnya SL digunakan?
- 1.9. Apakah SL relevan di lapangan dan di tingkat kebijakan?
- 1.10. Mengapa Pendekatan SL?
- 1.11. Kelahiran Pendekatan Sustainable Livelihood
- 1.12. Prinsip dan Praktek – Bagaimana mereka digunakan
- 1.13. Penggunaan Pendekatan Sustainable Livelihood

2. Bagian II. Kerangka Penghidupan Berkelanjutan

- 2.1. Memahami Kerangka SL
- 2.2. Platform dan Asset Penghidupan
- 2.3. Kegiatan dan diversifikasi penghidupan
- 2.4. Capaian penghidupan
- 2.5. Struktur dan Proses
- 2.6. Analisis konteks kerentanan dan bencana

3. Bagian III. Panduan Proses Fasilitator

- 3.1. Pengenalan Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan
- 3.2. Analisis Kegiatan/Aktivitas Penghidupan Masyarakat?
- 3.3. Apa itu pentagon aset ?
- 3.4. Apa saja kegiatan livelihood komunitas dan apa capaiannya ?
- 3.5. Faktor kerentanan yang berpengaruh pada penghidupan komunitas ?
- 3.6. Apa Pengaruh Struktur & Proses terhadap Livelihood ?
- 3.7. Apa pengaruh konteks merentankan pada livelihood ?
- 3.8. Bagaimana memetakan aset penghidupan komunitas ?
- 3.9. Bagaimana memetakan Capaian livelihood komunitas ?
- 3.10. Bagaimana memetakan struktur dan proses?
- 3.11. Bagaimana memetakan konteks merentankan komunitas ?
- 3.12. Pengenalan Singkat Metode Pendidikan Orang Dewasa

4. Bagian IV. Tools and Skills for SL: Metodologi Penggalan Data, Informasi, Pengetahuan dan Kebijakan Secara Partisipatif di Kampung

- 4.1. Data-Informasi-Knowledge-Wisdom
- 4.2. Data dan Informasi Sistem Penghidupan Berkelanjutan yang dibutuhkan
- 4.3. Tools dan Skills yang mungkin dibutuhkan
- 4.4. Contoh Disain Pemantauan Pangan & Penghidupan Partisipatif

Bibliography

Lampiran: Model-Model Kerangka Penghidupan Berkelanjutan Lainnya

Keterangan tentang penulis

Daftar Gambar

- Gambar 2.1 Framework for micro policy analysis of rural livelihood
- Gambar 2.2 Pentagon Asset: merepresentasikan kesenjangan asset yang dimiliki berdasarkan gender maupun suku/SARA.
- Gambar 2.3 Capital Asset Mapping
- Gambar 2.4 Perubahan Capital Asset KK dalam waktu. Ilustrasi Pentagon Asset 1999 & 2006 dari Desa Toinke, Timor Barat. NTT
- Gambar 2.5 Ilustrasi capital asset
- Gambar 2.6 Tiga Dimensi Kerentanan
- Gambar 2.7 Tingkat Analisis Kerentanan
- Gambar 2.8 Kerentanan Berbasis gender
- Gambar 2.9 Kerentanan Berbasis kelas
- Gambar 2.10 Kerentanan Kerentanan & kapasitas: fungsi waktu/dinamis – status yg terus bergerak
- Gambar 2.11a Dinamika Kerentanan dan Kapasitas Serap Komunitas
- Gambar 2.11b Dinamika kerentanan & Strategi Penghidupan
- Gambar 2.12 Household Respond to food insecurity
- Gambar 3.1 Siklus POD (bersifat deduktif)
- Gambar 4.1 Relasi data, informasi, pengetahuan dan kebijaksanaan. Sumber:
- Gambar 4.2. Cheklist Penelusuran Sistim Penghidupan Masyarakat
- Gambar 4.3. Ilustrasi Dimensi and Hasil Interaksi Kualitatif-Kuantitatif
- Gambar 4.4 Contoh Pemetaan Capital Asset
- Gambar 4.4.A Ilustrasi Trend Perubahan Asset dalam 5 Tahun Terakhir di Desa Toineke
- Gambar 4.5 Contoh Tabel Penelusuran Pengeluaran KK
- Gambar 4.6. Pengaruh dan Dampak Kuasa

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Perbandingan Pendekatan “Pembangunan Desa Terpadu” dan “Penghidupan Berkelanjutan”

Tabel 1.2 Prinsip-Prinsip Pendekatan Sustainable Livelihood dan bentuk prakteknya

Tabel 2.1 Ilustrasi Pemeringkatan Kekayaan Masyarakat 2 Desa di Timor Barat

Tabel 2.2. Ilustrasi Pengembangan Human Capital

Tabel 2.3 Ilustrasi Intervensi Pengembangan Sosial Capital

Tabel 2.4 Ilustrasi Intervensi Natural Capital

Tabel 2.5 Ilustrasi Intervensi Pysical-Infrastruktur Capital

Tabel 2.6 Ilustrasi Intervensi Financial Capital

Tabel 2.7 Perubahan, Kejutan dan Kerentanan

Tabel 2.8 Contoh Kelembagaan/Struktur

Tabel 2.9 Contoh Proses dan Regulasi

Tabel 3.1 Design Sesi: Pengenalan Kerangka Penghidupan Berkelanjutan

Tabel 3.2 Design Sesi: Kegiatan Livelihood

Tabel 3.3 Design Sesi: Pentagon Asset/Capital Asset

Tabel 3.4 Design Sesi: Capaian dan Hasil Livelihood

Tabel 3.5 Perbandingan Pendidikan Orang Dewasa & Konvensional

Tabel 3.6 Perbandingan Pendekatan Partisipatif vs Gaya Bank

Table 3.7. Tipikal Metode Ajar Pendidikan Orang Dewasa (POD)

Tabel 3.8. Perbandingan komponen dunia realitas dan dunia buatan

Tabel 4.1. Tools & Skills Yang Diperlukan (dikembangkan penulis)

Tabel 4.2. Tabel Pemeringkatan Kekayaan Berdasarkan Kepemilikan Aset

Tabel 4.3 Contoh Matriks perubahan asset (selektif) dan cara perolehan pangan di desa Anonim Timor Barat

Tabel 4.4 Contoh: Trend Masalah Pangan & *Coping Mechanism*

Tabel 4.5 Penelusuran Pengeluaran Rumah Tangga

Daftar Box

Box 1.1

Hubungan Manusia dan Negara

Box 1.2

Laporan Milenium Development Goals Indonesia 2004

Box 2.1

Pertanyaan diagnosis dalam memahami *human capital*:

Box 2.2

Ceklist pemetaan *natural capital*

Box 2.3

Ceklist Menganalisis *financial capital*?

Box 2.4

Contoh Diversifikasi Strategi Penghidupan Pak Ramli

Box 2.5

Ceklist Keberlanjutan Strategi Penghidupan

Box 2.6

Diagnosis Proxy Indikator Untuk Diagnosis Kerentanan

Box 3.1

Contoh Kasus: Konteks Desa Lama Muda, Aceh Barat Daya

Box 3.2

Ciri belajar partisipatif

Box 3.3

Tahapan Penghadiran "realitas" dalam training

Box 4.1

Analisa Data Trend Perubahan Coping Mechanism

Daftar Singkatan

BPS: Biro Pusat Statistik (Central Statistical Bureau)
BULOG: Badan Urusan Logistik (National Logistical Agency)
BRR: Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
CRED: Centre for Research on Epidemiology of Disasters
CSOs: Civil Society Organisation
FKPB: Forum Kesiapan & Penanganan Bencana
OMS: Organisasi Masyarakat Sipil
FAO: Food and Agricultural Organisation
LSM: Lembaga Swadaya Masyarakat
PVOs: Private Voluntary Organisations
NGOs: Non Governmental Organisation
NTT: Nusa Tenggara Timur
KPA: Komite Peralihan Aceh
WFP: World Food Program
UK: United Kingdom
US: United States of America
DFID: Department for International Development, UK
HIVOS: Humanist Institute For Co-operation With Developing Countries, Netherlands
UNDP: United Nations Development Program
SL: Sustainable Livelihood
SLA: Sustainable Livelihood Approach
SLF: Sustainable Livelihood Framework
GAM: Gerakan Aceh Merdeka
PPL: Petugas Pendamping Lapangan
PMPB: Perkumpulan Masyarakat Penanganan Bencana
PSL: Pendekatan Sustainable Livelihood
SEA: Southeast Asia
SDA: Sumber Daya Alama
SDM: Sumber Daya Manusia

PENGANTAR EDITOR

Kerangka kerja ini menempatkan masyarakat sebagai fokusnya, dalam artian membangun relasi subyek-subyek, atau yang direduksi dalam istilah *people-centered* di mana komunitas yang miskin (dianggap/diasumsikan atau dipersepsikan miskin), merupakan subyek yang pengalamannya kami (tentunya juga sebagai subyek), bagikan dalam kerangka konseptual yang selanjutnya disebut sebagai kerangka atau Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan.

Membangun relasi “subyek-subyek” merupakan sebuah ‘*positioning*’ sikap kesetaraan yang diambil penulis secara sadar untuk menghindari sikap ‘sok tahu’ atau ‘dominasi’ wacana terhadap kaum yang sudah diposisikan marginal dalam ranah bahasa: kaum miskin.

Manusia menciptakan kata dan istilah karena ia *exist* dalam ranah semantik. Lansekap realitas yang kompleks, ragam dan bertingkat mendorong manusia untuk menemukan jawaban serta penjelasan, melawan status quo dan menuntut perubahan secara positif relatif. Lahirnya kata dan istilah baru, kelahiran kembali istilah yang lama dengan arti baru serta kata-kata yang didaur ulang menjadi istilah dengan hembusan makna yang ‘baru’ merupakan upaya yang dibangun manusia dalam membangun diri dan lingkungan di luar dirinya sendiri.

Konon, menurut Chambers, kombinasi kata berpengaruh dalam tiga cara¹: *Pertama*, kata-kata digunakan untuk berfokus pada dan melahirkan konsep yang radikal yang secara teknis tersamar. *Kedua*, gabungan kata memperluas cara pandang disiplin ilmu dan menjembatani antar dan interdisiplin ilmu. *Ketiga*, kombinasi kata bisa merupakan perkembangan, yang diawali dengan tidak sepenuhnya terdefiniskan namun menyediakan tantangan dan kesempatan untuk menciptakan makna.

¹ Lihat John Chambers 2004 Ideas for Development: Reflecting Forwards. IDS Working Paper 238, IDS, Brighton, England.

Contoh yang diberikan adalah kombinasi kata berjudul “*sustainable livelihood*” yang dibubuhkan sebagai judul sebuah konferensi, yang selanjutnya istilah tersebut digunakan dalam sebuah buku yang berjudul “*The Greening of Aid: Sustainable Livelihood in Practice*”². Kemudian ditangkap sebagai sebuah frase yang secara progresif dieksplorasikan, dielaborasi makna keberlanjutan dari penghidupan (*livelihood*) serta penghambusan makna yang lebih dalam dan lebih kuat ketika kedua kata digabungkan “*sustainable livelihood*” atau penghidupan berkelanjutan (Chambers 2004:5).

Rupanya pembangunan tidak hanya melulu fisik-material, maupun social-kelembagaan, tetapi juga konseptual, yang di sana terjadi pabrikasi kata, istilah dan frase menjadi tak terhindarkan bahkan menjadi kebutuhan menuju perubahan yang dibayangkan ideal dan yang ‘seharusnya’ dalam konteks kekinian. Sebuah “pembangunan istilah” dan tidak sekedar ‘istilah pembangunan’ yang terberi (*given*).

Sedikitnya dua dekade silam, kecuali istilah ‘kemiskinan’ dan keadilan (*equity*) istilah-istilah seperti kapabilitas, *entitlements* (ke-ber-hak-an), *livelihood*, kerentanan (*vulnerability*), deprivasi, akuntabilitas, desentralisasi, pemberdayaan, partisipasi, kepemilikan (*ownership*), pemangku kepentingan, transparansi, kemitraan, masyarakat sipil, globalisasi, governance, demokrasi, HAM dan keberlanjutan tidaklah semenonjol masa kini dalam wacana pembangunan internasional, sebagiannya lagi bahkan baru dipromosikan, dan menggeser istilah lama. Dari istilah-istilah di atas, hanya kata ‘partisipasi’ yang mendapatkan porsi pembahasan khusus dalam *The Development Dictionary* ciptaan Sachs 1992 (Chambers 2004:3).

Penciptaan dan pabrikasi kata merupakan bukti tersendiri dari eksistensi manusia, setidaknya menurut Fritjof Capra bahwa ‘menjadi manusia adalah berada dalam bahasa’.³ Dalam konteks penerjemahan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia, istilah *livelihood*

² Lihat: Conroy and Litvinoff 1988 in Chambers 2004. Istilah Sustainable Livelihood kemungkinan pertama kali digabungkan dalam diskusi pada tahun 1985 pada Advisory Panel on Food Security, Agriculture, Forestry, Environment of the World Commission on Environment and Development, yang juga dimasukkan ke dalam Brundtland Report 1987.

³ “To be human is to exist in language”. Dari Fritjof Capra (1996:282) *The Web of Life: a New Synthesis of Mind and Matter*, London: Harper Collins. Versi Bahasa Indonesianya diterjemahkan “Menjadi manusia ialah berada dalam bahasa” [halaman 423, Jaring-Jaring Kehidupan, Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan. Cetakan I Tahun 2001. Fajar Pustaka Baru, Indonesia]

diterjemahkan sebagai “penghidupan”. *Sustainable livelihood* diterjemahkan sebagai “penghidupan berkelanjutan”.

Buku ini lahir ditangan anda sebagai sebuah tawaran untuk memahami realitas lokal yang kompleks, yang tidak bisa direduksikan dengan pendekatan lama dalam memahami masyarakat desa dan marginal. Istilah “mata pencaharian” kepala keluarga (KK) kerap digunakan pengambil kebijakan yang secara tidak sadar gagal memahami realitas: “kompleksitas lokal atau lokalitas yang kompleks”.

Bukan sekedar istilah.

Sustainable Livelihood bukan sekedar sebuah istilah baru yang dilahirkan para ‘ahli pembangunan’ di barat. Dalam realitas, praktek ini sudah lama lahir ditimur, dalam ranah konseptual, dilahirkan dalam pengalaman yang beririsan dalam perjumpaan barat-timur dalam kerja sama bantuan internasional.

Oleh karenanya tidak terlalu tepat bila buku ini dibaca sebagai bagian dari hegemoni barat. Kritik Satre bahwa Timur sekedar mengikuti kata-kata yang diciptakan barat, pada dirinya adalah benar tetapi tidak cukup menjelaskan bahwa sebagai orang Timur, kami (penulis) tetapi juga pembaca bisa merebut ruang tafsir dalam bahasa kita sendiri yakni bahasa Indonesia.

Di tingkat aktualitas dan faktualitas, hidup dan penghidupan masyarakat pedesaan di Indonesia sesungguhnya sudah, sedang dan akan terus (terpaksa/ dipaksa) untuk diceraikan dari pertanian dan tanahnya sendiri dan bahkan terlalu kompleks untuk disederhanakan dengan jargon dan ideologis semata.

Pertanian dan tanah kemudian dirasakan tidak mampu menjadi penopang tunggal penduduk di desa. Dalam bahasanya *Cain and McNicoll* (1988), keluarga-keluarga petani desa dimaksud semakin menyerupai atau tepatnya miniatur dari konglomerat-konglomerat, dengan kecirian yang ragam dan unik⁴. Alasannya, seperti para

⁴ “Population Growth and Agrarian Outcomes” in Lee et al. Eds “Population, Food and Rural Development”. Oxford, Clarendon Press 101-117.

konglomerat dengan diversifikasi usaha skala besar yang saling menopang antara satu kegiatan investasi dengan kegiatan investasi lainnya, membuat seorang konglomerat ngotot dalam usaha menciptakan keuntungan yang berkelanjutan.

Sustainable Livelihood sebagai konsep yang kami tawarkan bermakna gugatan terhadap praktek status quo dalam analisis pembangunan desa dan kemiskinan. Penjelasan pada bagian berikutnya akan membantu anda memahami konteks dan sistim penghidupan masyarakat miskin, atau yang disebut/dianggap miskin, yang marginal yang memberikan inspirasi bagi rumusan intervensi program pembangunan yang lebih bermartabat.

Pola dan kandungan makna kata “kekayaan dan kemiskinan” telah menjadi semakin ragam dan kabur bergantung pada ideologis, cara pandang, dan kepercayaan. Sedangkan pada titik yang lain, realitas ataupun realitas yang dipersepsikan dalam pikiran secara sederhana menunjukkan terjadinya proses produksi dan reproduksi kemiskinan secara terus menerus di desa-desa, di mana masyarakat di putuskan (*de-linked*) dari sumber daya alamnya dengan atau tanpa alternatif pilihan yang tersedia.⁵

Buku ini menawarkan ketrampilan menganalisis konteks pedesaan secara lebih utuh, namun tidak mengharapkan pembaca terjebak pada kenafian seorang pemotret yang kebahagiaannya bertumpu total pada hasil dan kualitas potretnya. Tidak hanya terjadi pada pemula, tetapi umumnya pekerja pembangunan dan pengembangan masyarakat gampang terjebak dalam kesenangan sesaat ketika telah menganalisis konteks sebuah desa, yang lengkap dengan visualisasi (*village mapping*) yang dengan gampang ditransfer ke GIS, padahal perubahan positif belum terjadi di dalam realitas.

Proses pembangunan komunitas pedesaan tentunya tidak bisa reduksikan sebagai proses ‘potret’ semata yang hanya berfokus pada tingkat “resolusi” dan kemitakhiran alat yang dipakai. Buku ini bukan hanya menawarkan bagaimana memotret konteks dan realitas kampung/desa/ pedesaan/komunitas/ namun menawarkan cara pandang bagaimana membangun skenario peningkatan kualitas hidup dan penghidupan di desa, sebagai harapan dan pembayangan idealnya pembangunan pedesaan khususnya dan pembangunan umumnya dijalankan.

⁵ Lihat: Jonathan Rigg (2006:180) “Land, Farming, Livelihoods, and Poverty: Rethinking the Links in the Rural South” World Development Vol. 34, No. 1, pp. 180–202.

Pesan penting dari pendekatan *SL* adalah bahwa ia di mulai dengan analisis kekuatan dan kapasitas lokal, bukannya kebutuhan yang perlu disuplai dari luar. Pendekatan ini menyiratkan pengakuan akan potensi yang melekat pada semua orang, pada satuan analisis yang lebih luas adalah masyarakat apakah potensi itu berasal dari jaringan kerja sosial mereka yang kuat, akses mereka pada sumberdaya dan prasarana fisik, kemampuan mereka untuk mempengaruhi lembaga-lembaga kunci maupun faktor lain yang berpotensi mengurangi kemiskinan.

Ini tidak berarti bahwa pendekatan ini meletakkan fokus yang tidak semestinya pada anggota masyarakat yang bernasib lebih baik. Dalam upaya pembangunan yang menitikberatkan *livelihoods*, tujuan kuncinya adalah menghilangkan hambatan-hambatan untuk mewujudkan potensi tersebut. Jadi masyarakat akan difasilitasi agar mereka menjadi lebih berdaya, lebih kuat, dan lebih mampu untuk mencapai tujuan mereka sendiri maupun untuk memberdayakan sesamanya.

Pesan dasar dari penggunaan buku ini adalah bila program-program dan proyek-proyek pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia dikerangkakan secara sadar dalam kerangka Penghidupan Berkelanjutan (*Sustainable Livelihood*) maka capaian Millenium Development Goals (MDGs) yang ingin dicapai di tahun 2015 bisa lebih optimis dicapai jika dan hanya jika ditingkat operasional agenda pembangunan dilahirkan dari kerangka pikir yang memadai.

Selamat Membaca!

Tim Penulis

SEPUTAR PENGGUNAAN BUKU INI

Manfaat Buku ini secara khusus ditujukan bagi banyak pihak: Pertama adalah bagi akademisi Indonesia yang menggeluti studi pembangunan, pengamat pembangunan, serta pengambil kebijakan pembangunan baik di tingkat pemerintahan maupun LSM dan lembaga-lembaga filantropi. Bab I menyajikan tentang landasan konseptual Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan atau yang (selanjutnya diringkaskan menjadi PSL). Sedangkan Bab II menyajikan tentang isi dan konsep Kerangka Penghidupan Berkelanjutan atau juga bisa disebut kerangka konsep "Penghidupan Berkelanjutan" yang disingkat sebagai PSL.

Namun fungsi buku ini juga diperluas menjadi pegangan atau panduan dalam menjalankan konsep ini di dalam training/workshop dengan metode pendidikan orang dewasa (*popular education*). Oleh karena itu, Bab III buku ini dengan sendirinya menjangkau para calon fasilitator yang tertarik menggunakan pendekatan ini di masyarakat desa ataupun bagi pekerja lapangan maupun petugas pendamping lapangan (PPL).

Yang unik dari Bab III adalah dimasukkannya konsep dan filosofi training sebagai sebuah dunia buatan. Dunia buatan sebagai sebuah proses yang sengaja diputuskan (*de-link*) dari realitas kompleks. Disebut 'dunia buatan'⁶, di mana realitas direduksi/dimodelkan/dianalisis/ dimengerti. Ada pengandaian tentang 'yang ideal' yg tidak statis. Ada dekonstruksi realitas & pengalaman. Bila proses training merupakan sebuah proses '*de-linked*', maka proses-proses perumusan strategi intervensi dan implementasi program

6 Ignas Kleden berbicara mengenai peranan sekolah dalam menjalankan fungsi Linking & Delinking membantu kita memahami masa studi kita di kampus. Fungsi yang pertama, adalah sekolah mengambil jarak dari kompleksitas masyarakat, menyederhanakan masyarakatnya dalam suatu lingkungan yang artifisial agar dalam lingkungan buatan (baca: sekolah) ini, peserta didik dapat dipersiapkan dengan lebih metodis untuk kembali menghadapi kompleksitas masyarakatnya. Fungsinya yang kedua, sekolah mengambil jarak dan untuk sementara waktu, memutuskan hubungan dengan segi-segi negatif dan destruktif dari masyarakatnya, agar peserta didik dapat disiapkan justru untuk menghadapi segi-segi negatif tersebut dengan persiapan yang lebih matang dengan sikap yang lebih kritis. Dalam fungsinya yang ketiga, sekolah mengambil jarak terhadap perbedaan-perbedaan kelas sosial dalam masyarakat, menciptakan kemungkinan untuk akses baru bagi peserta didik agar dia kembali dapat menerobos batas-batas kelas sosial yang pantas bagi dirinya. ini yang disebut oleh Ignas Kleden sebagai proses delinked and linked. Lihat: Artikel Basis No. 3-4 Mei-Juni 1996 dengan judul "Linking" & "Delinking" Dalam Pendidikan & Kebudayaan oleh Ignas Kleden.

merupakan sebuah proses yang membangun kembali hubungan yang diputuskan itu. Di sini selalu terjadi dilemma, karena sinkronisasi tidak selalu terjadi secara harmoni karena keduanya adalah dunia yang berbeda dan sulit disatukan.

Dalam sebuah proses training yang ‘memberdayakan’, tentunya diharapkan terjadinya sikap kritis bahwa realitas yang kompleks diperangkap dalam kerangka konseptual yang tidak hidup, namun menjadi hidup ketika peserta menggunakannya sebagai alat untuk melakukan diagnosis, prognosis (status quo dan skenario tindakan) serta rumusan terapi atau tepatnya intervensi yang direncanakan untuk melakukan perubahan positif relative di masyarakat.

Buku ini menyarankan filsafat ‘talepo’⁷ bahwa “yang duduk di bawah” tidak perlu takut jatuh. Yang ada adalah hanyalah murid yang guru dan guru yang murid yang terus belajar. Masyarakat miskin dan marginal adalah guru (yang gagal tapi juga yang berhasil): (1) berhasil karena kegagalannya memberikan pesan mengenai kondisi dan proses yang menggagalkan. (2) keberhasilannya memberikan inspirasi, tempat bertelut lutut para guru yang selalu jadi murid. Murid yang ‘saujana’⁸.

Bab IV menyajikan metode pengambilan informasi dan teknik pengambilan data yang diperlukan berkaitan dengan kerangka PSL. Manfaat Bab ini dengan sendirinya bisa ditujukan bagi mahasiswa yang tertarik dengan penelitian kualitatif dan partisipatif serta berbagai peneliti yang tertarik melakukan uji coba pendekatan ini. Bab ini tentunya hanya memberikan secara kasar metode dan alat serta teknik pengambilan data secara singkat.

Manfaat buku ini tentunya bisa diperluas bagi para pekerja kemanusiaan tertarik melakukan intervensi paska-bencana dengan pendekatan penghidupan berkelanjutan, untuk meminimalisir pendekatan ‘Santa Klaus’ atau Sinterklas, karitatif dan *relief oriented*.

Misi buku ini juga bisa diperluas dan ditujukan kepada para pemangku kepentingan pembangunan dan pengembangan masyarakat, yang tertarik dalam melakukan analisis

7 Istilah lokal di Timor dan sebagian Padang yang berarti duduk melantai, secara fisik, ego dan psikis.

8 Sanskrit: yg terus mencari kebenaran

mata pencaharian, analisis sistem kehidupan pada satuan individu, keluarga, komunitas baik desa, kecamatan, kabupaten bahkan negara.

Buku ini diharapkan membantu para pihak dalam memahami, mendalami serta secara praktis merumuskan dan menjalankan agenda pembangunan dan melaksanakan pelatihan-pelatihan berperspektif *Sustainable Livelihood*.

Mengapa buku ini diterbitkan? Buku merupakan kelanjutan misi Hivos-Circle Indonesia melakukan penguatan organisasi masyarakat sipil (OMS) lokal di Aceh dalam melakukan pembangunan kembali Aceh paska tsunami dan konflik. Namun karena di sadari bahwa buku berbahasa Indonesia yang secara serius memperkenalkan kerangka PSL masih sangat minim atau tepatnya bisa dikatakan belum ada, maka buku ini ditulis untuk menjangkau para pemangku kepentingan pembangunan masyarakat di Indonesia termasuk Aceh namun bisa diperluas hingga ke pelosok Timur Indonesia seperti Papua, Nusa Tenggara dan berbagai pulau-pulau besar seperti Kalimantan dan Sulawesi.

Disadari bahwa banyak pihak tidak eksklusif OMS lokal di Aceh serta berbagai tempat di Indonesia, tetapi juga banyak pihak - dari donor, lembaga PBB, NGO-NGO lokal, nasional, dan internasional, Pemerintah RI, Pemerintah, lembaga- lembaga kontraktor, mahasiswa dan universitas - yang membutuhkan penguatan kapasitas untuk memahami lokalitas yang kompleks.

Konteks Aceh dan Nias yang "serba seragam" dan "copy paste" konteks eksternal ke dalam konteks bantuan perumahan baru korban tsunami/gempa, "serba seragam" dalam intervensi paket bantuan *livelihoods* dengan skala KK penerima bantuan yang luar biasa banyak kerap membuat masyarakat yang pada awalnya "no-thing to lose" alias 'kalau dapat bantuan syukur tidak juga syukur", justru diperhadapkan pada kesulitan-kesulitan paska produksi seperti ketiadaan pasar dan informasi mengenai pasar.

Keterlibatan banyak pihak dalam proses rehabilitasi dan pembangunan dalam konteks di Aceh, di satu sisi, mungkin mempercepat realisasi pembangunan sebagaimana rencana sebelumnya. Tetapi dari sisi lain, kapasitas, perspektif, dan keterampilan para pelaku rekonstruksi dan pemulihan multi-sektor yang timpang, dapat mengakibatkan

pembangunan di Aceh dan Nias menimbulkan dampak negatif dalam rentang waktu jangka panjang, yang dalam buku ini disebut "penciptaan kerentanan jangka panjang" yang tidak menjamin keberlanjutan penghidupan masa depan".

Cerita-cerita yang bersifat anekdotial seperti penanaman kacang tanah yang seragam di Aceh Barat Daya dan Aceh Barat tanpa memperdulikan kualitas tanah, konteks pasang surut, sumber daya dan pengalaman dan ketrampilan serta prioritas penerima bantuan, serta aspek-aspek paska produksi seperti pemasaran dan informasi harga dan pasar, membuat masyarakat seolah menginvestasikan waktu produksi komoditas yang sudah ditentukan 'dari atas' secara sia-sia.

Cerita yang sama terjadi di berbagai belahan bumi Indonesia. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Pulau Timor (NTT) sebagai misal, kerap mengasumsikan bahwa masyarakat pesisir bermata pencaharian tunggal. Alhasil, target pemberian paket penguatan KK nelayan sering jauh lebih tinggi dari KK nelayan yang sejati, yang juga bisa dengan gampang tersisihkan.

Pertimbangan perencanaan rekonstruksi dan pembangunan kembali yang tidak holistik dan komprehensif, dan pendekatan-pendekatan strategi pembangunan yang kurang memperhitungkan sistem penghidupan masyarakat lokal dalam pengelolaan aset-aset penghidupan yang beragam, serta tidak memperhitungkan sisi keberlanjutan jangka panjang akan melahirkan kerentanan baru dan bahkan kemiskinan yang terus berkajang.

Dalam konteks seperti itu, buku berjudul *Sustainable Livelihood Framework* ini menjadi sebuah tawaran perspektif, seperangkat prinsip, alat, dan pendekatan pembangunan yang dapat diadopsi di Aceh dan Nias, yang dapat dipedomani.

Buku ini merupakan bagian dari upaya mendiskusikan, mendialogkan, mensosialisasikan, dan membumikan *Sustainable Livelihood Framework* di Aceh secara khusus maupun di Indonesia secara umum.

Proses Kelahiran modul ini. Buku modul ini merupakan rangkuman dari proses-proses dan dokumen-dokumen training *Sustainable Livelihood Framework* yang dilaksanakan

oleh Hivos Aceh Program di Bireuen⁹ Maret 2006, di Blang Pidie¹⁰ April 2006, di Banda Aceh¹¹ Juni 2006, dan TOT-PSL di Sabang¹² akhir Juni 2006. Dokumen-dokumen dari proses dan materi-materi bahasan dalam 4 training tersebut ditata-ulang dan disistematisasikan kembali menjadi pegangan para pihak dalam menjalankan pelatihan-pelatihan serupa dan mengaplikasikan kerja-kerja pembangunan livelihood masyarakat dengan kerangka kerja penghidupan berkelanjutan (*Sustainable Livelihood Framework*).

Harapan editors/penulis? Kami berharap buku ini menjadi perintis lahirnya modul-modul training SLF berbahasa Indonesia di masa yang akan datang. Praktisnya, harapan kami adalah ketika orang menganalisis kemiskinan di Bagian Timur Indonesia, pembangunan kembali daerah-daerah paska bencana seperti Aceh dan Nias serta daerah-daerah paska bencana di Indonesia lainnya, maka ada pilihan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami realitas lokal yang sesungguhnya tidak sederhana yang dipikirkan kaum *reductionist*.

Lebih dari itu, buku ini kita harapkan agar para pihak pelaku pembangunan di Indonesia terutama di Aceh dan Nias sebagai konteks yang melahirkan modul ini, mampu melakukan koreksi atas pendekatan yang tidak holistik yang diakibatkan oleh kerangka analisis *pra-design* yang tidak komprehensif.

Semoga para pelaku pembangunan Aceh/Nias dan Indonesia secara umum berpegang teguh pada prinsip-prinsip *sustainable livelihood*. Bagi pihak-pihak yang selama ini sudah mengenal dan mungkin menggunakan kerangka kerja SL, diharapkan buku ini menjadi upaya mendialogkan, mendorong lebih kuat dan memperkaya gagasan tentang pbumian SL di berbagai tempat bukan hanya di Aceh dan Nias tetapi Indonesia.

9 Training SL di Bireuen diikuti oleh 35 peserta dari 15 LSM yang berasal dari Pantai Timur Aceh yakni: Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen dan Pidie.

10 Training SL di Blang Pidie diikuti oleh 30 peserta dari 12 LSM/CBOs yang berasal dari Pantai Barat yakni: Aceh Barat, Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan.

11 Training SL di Blang Pidie diikuti oleh 25 peserta dari 13 LSM/CBOs yang berasal dari Aceh Besar, Banda Aceh, Sabang dan Aceh Selatan.

12 Peserta TOT adalah yang peserta yang terseleksi dalam training di Pantai Barat, Pantai Timur dan Banda Aceh dengan jumlah peserta 14 orang.

Kritik seradikal apapun akan kami terima sebagai pelajaran dan masukan demi perbaikan pada edisi yang akan datang.

Selamat menjelajahi buku ini!

Tim Penulis

PENGENALAN KONSEP DAN DEFINISI

Penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihoods*) merupakan penggabungan dua kata yang menonjol dalam diskursus maupun wacana pembangunan masyarakat masa kini. Penggabungan ke dua kata di atas menjadi sebuah frase yang kemudian dihembuskan makna yang lebih dalam, harus juga dilihat sebagai ‘praktek pembangunan’ dalam konteks semantik.

Dua dekade silam, kecuali kemiskinan dan keadilan (*equity*) istilah-istilah seperti kapabilitas, *entitlements* (ke-ber-hak-an), *livelihood*, kerentanan (*vulnerability*), deprivasi, akuntabilitas, desentralisasi, pemberdayaan, partisipasi, kepemilikan (*ownership*), pemangku kepentingan, transparansi, kemitraan, masyarakat sipil, globalisasi, *governance*, demokrasi, HAM dan keberlanjutan tidaklah semenonjol masa kini dalam wacana pembangunan internasional, sebagiannya lagi bahkan baru dipromosikan, dan menggeser istilah lama. Dari istilah-istilah di atas, hanya kata ‘partisipasi’ yang mendapatkan porsi pembahasan khusus dalam *The Development Dictionary* ciptaan Sachs 1992 (Chambers 2004:3).

Buku ini lahir ditangan anda sebagai sebuah tawaran untuk memahami realitas lokal yang kompleks, yang tidak bisa direduksikan dengan pendekatan lama dalam memahami masyarakat desa dan marginal. Istilah “mata pencaharian” kepala keluarga (KK) kerap digunakan pengambil kebijakan yang secara tidak sadar gagal memahami realitas: “kompleksitas lokal atau lokalitas yang kompleks”.

Sustainable Livelihoods sebagai konsep yang kami tawarkan bermakna gugatan terhadap praktek status quo dalam analisis pembangunan desa dan kemiskinan. Penjelasan pada bagian berikutnya akan membantu anda memahami konteks dan sistim penghidupan

masyarakat miskin, yang marginal yang memberikan inspirasi bagi rumusan intervensi program pembangunan yang lebih bermartabat.

Secara etimologis, makna kata '*livelihood*' itu meliputi aset atau modal (alam, manusia, finansial, sosial dan fisik), aktifitas di mana akses atas aset dimaksud dimediasi oleh kelembagaan dan relasi sosial) yang secara bersama mendikte hasil yang diperoleh oleh individu maupun keluarga.

Kata "*akses*" didefinisikan di sini sebagai "aturan dan norma sosial yang mengatur atau mempengaruhi kemampuan yang berbeda antara orang dalam memiliki, mengontrol, mengklaim atau menggunakan sumber daya seperti penggunaan lahan di desa atau komunitas kampung".

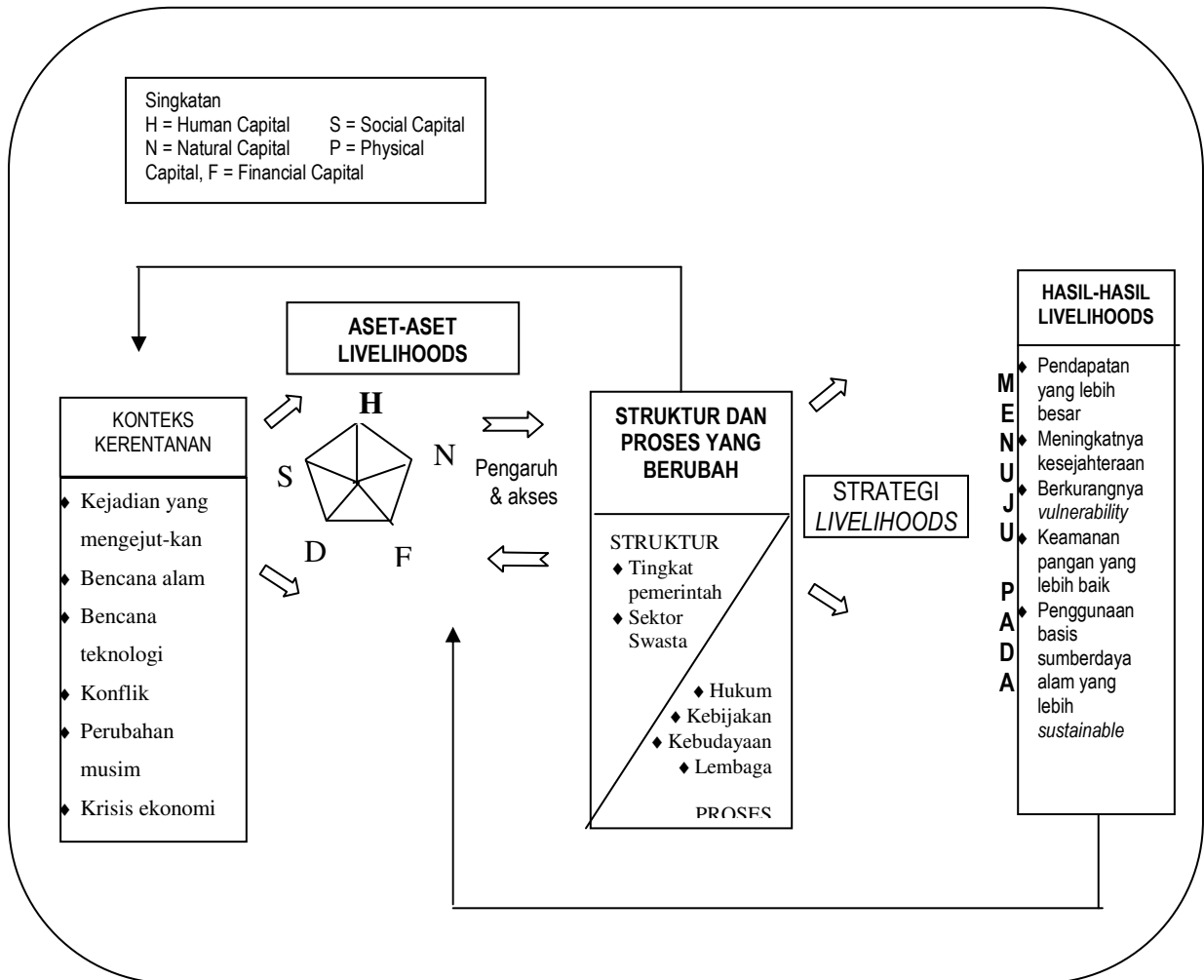
1.1 Kerangka Kerja Penghidupan Berkelanjutan (*Sustainable Livelihood*)

Kerangka kerja SL yang dibahas di buku ini tergambar pada gambar 1.1 dan 1.2. Gambar 1.2 merupakan penyempurnaan atau tepatnya merupakan presentasi dua dimensi yang tentunya memiliki keterbatasan dalam memahami dinamika di masyarakat yang dalam prakteknya jauh lebih kompleks keterkaitan dan interaksi antara komponen SL. Namun demikian, kekompleksan dan dinamika dimaksud terimplikasikan pada gambar 1.2, di mana beberapa proses kunci teridentifikasi dan didiskusikan pada kerangka kerja SL (Gambar 1.2).

Sedangkan sebagai kerangka kerja *sustainable livelihood* (selanjutnya disebut SL) berusaha memberikan gambaran kenyataan atau potret yang lebih utuh dengan realitas penghidupan unit komunitas tertentu yang diamati. Titik berangkatnya adalah bahwa banyak keluarga petani desa [dalam arti sebenarnya] di Jawa, Aceh, serta belahan Indonesia lainnya yang dengan berbasiskan pada lahannya semata, tidak lagi mampu menyediakan kecukupan dalam bertahan hidup. Dan untuk alasan mempertahankan hidupnya [sebagai personal maupun keluarga], umumnya keluarga petani desa membuat kecukupan hidupnya dengan menciptakan keragaman portofolio aktifitas penghidupan dan sumber penghasilan (*income*), di mana hasil panen dari lahan/kebun hanya

merupakan salah satu dari sekian banyak pilihan kegiatan yang menopang tingkat kesejahteraannya.

Gambar 1.1. Kerangka Sustainable Livelihood (Di Terjemahkan dari DFID 1999, Sustainable Livelihoods Guidance Sheets.)

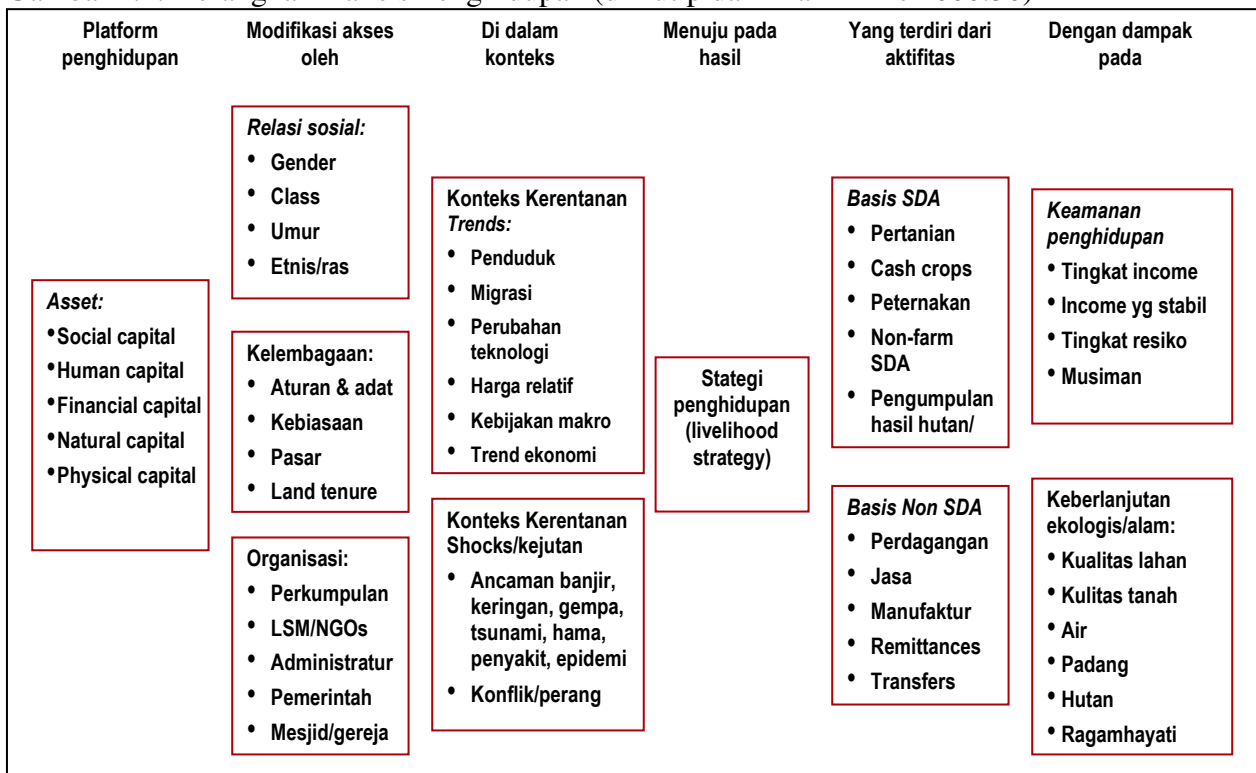


Cain and McNicoll (1988) mengamati kehidupan dan penghidupan keluarga-keluarga petani desa yang disebut sebagai semakin menyerupai atau tepatnya miniatur dari konglomerat-konglomerat kaya. Seperti para konglomerat yang ngotot melakukan diversifikasi usaha skala besar yang saling menopang antara satu kegiatan investasi dengan kegiatan investasi lainnya, membuatnya berjuang dalam usaha menciptakan keuntungan yang berkelanjutan.

Namun demikian, kerangka kerja ini berusaha menyediakan *a way of thinking* mengenai penghidupan kaum yang dianggap marginal dan miskin. Kerangka kerja ini melihat masyarakat berada dalam konteks tertentu seperti kerentanan di mana kerap terjadi bencana dan konflik kekerasan dan bahkan berbagai kecenderungan krisis.

Di dalam konteks yang seperti inilah, masyarakat hidup dan demi kelangsungan hidup dan penghidupannya, mereka bertumpu pada aset-aset penghidupan yang ragam seperti aset sumber daya alam dan lingkungan, sosial capital, finansial capital serta sumber daya manusia seperti pendidikan yang mampu diakses dan sumber daya infrastruktur fisik. Keberlanjutan penghidupan dari masyarakat yang disebut 'miskin/marginal' sering secara cermat melakukan juga diversifikasi kegiatan yang merupakan hasil transformasi dari aset-aset/sumber daya/capital atau modal yang disebutkan di atas yang di dalam gambar 1.2 di sebut sebagai "platform penghidupan".

Gambar 1.2. Kerangka Analisis Penghidupan (di kutip dari Frank Ellis 2000:30)



Sebagai koreksi terhadap model yang dikembangkan DFID 1999 (Gambar 1.1) maka oleh Frank Ellis (2000) dimodifikasikan untuk menunjukkan peran akses secara lebih tegas.

Gambar 1.2. memberikan ilustrasi bahwa suatu unit keluarga atau komunitas tertentu melangsungkan hidup dan penghidupannya dengan bertumpu pada berbagai asset yang dimilikinya atau yang secara materil dan imaterial melekat pada unit dimaksud. Aset tersebut meliputi modal sosial, modal manusia (SDM), modal finansial ekonomi, modal sumber daya alam dan lingkungan serta modal fisik infrastruktur. Tetapi akses pada modal-modal tersebut kerap dimodifikasi oleh peran relasi sosial (seperti gender, kelas ekonomi, umur, etnisitas, agama/ras), pengaruh kelembagaan (aturan, adat, kebiasaan, pasar) dan organisasi (seperti LSM/INGOs, administratur dan pemerintah dalam arti luas, lembaga agama seperti mesjid dan gereja dan organisasi keagamaan dalam arti luas) yang berada dalam konteks kerentanan (meliputi kejutan seperti bencana alam dan perang/konflik, maupun tren seperti krisis ekonomi, harga yang fluktuatif, pertumbuhan penduduk dan masalah kependudukan serta perubahan teknologi dan kebijakan makro).

Beranjak dari konteks tersebut, strategi penghidupan suatu unit keluarga/unit komunitas terdiri dari berbagai aktifitas yang dibagi dalam dua kategorisasi yakni aktifitas penghidupan berbasis sumber daya alam (seperti pertanian, peternakan, perikanan, komoditas, hasil hutan non-kayu¹³ dan berbagai *cash crops* lainnya) dan aktifitas non-SDA seperti perdagangan, jasa, industri dan manufaktur, transfer¹⁴ dan remittance¹⁵ dengan dampak pada capaian keamanan penghidupan seperti tingkat *income* yang stabil, resiko yang berkurang dan capaian keberlanjutan ekologis yakni kualitas tanah, hutan, air serta keragaman hayati yang terpelihara.

1.2 Mengapa Kerangka Kerja?

Kerangka kerja *sustainable livelihoods* menjelaskan faktor-faktor utama yang mempengaruhi *penghidupan* masyarakat serta hubungan khusus diantara faktor-faktor tersebut. Kerangka kerja ini bisa digunakan baik untuk merencanakan kegiatan pembangunan baru maupun untuk menilai sumbangan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan bagi keberlanjutan *penghidupan*.

13 Sering dikenal dengan istilah NTFP (Non Timber Forest Products)

14 Bisa dalam bentuk bantuan pangan, keuangan dan sebagainya.

15 Contoh kiriman uang TKI terhadap keluarganya dari Malaysia dan Hongkong.

Secara khusus, kerangka kerja ini:

- menyediakan *checklist* inventaris persoalan-persoalan penting dan mengkerangkakan cara di mana isu-isu tersebut berhubungan satu sama lain;
- memperhatikan pengaruh-pengaruh dan proses-proses inti; dan
- menekankan berbagai hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi *livelihoods*.
- Kerangka kerja ini menempatkan masyarakat sebagai fokusnya (lihat penjelasan awal Bab II). Kerangka kerja ini tidak dipakai secara linier dan tidak dimaksudkan menyuguhkan model realitas yang persis. Tujuannya adalah membantu *stakeholders* yang mempunyai perspektif yang berbeda untuk terlibat dalam debat yang kaya dan padu mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi *penghidupan*, arti penting dari, serta hubungan antara, faktor-faktor tersebut. Upaya ini, pada gilirannya, mesti membantu dalam mengidentifikasi *entry points* yang tepat bagi intervensi penghidupan.

1.3 Ukuran Keberlanjutan

Keberlanjutan mempunyai banyak dimensi yang semuanya penting bagi pendekatan *sustainable livelihoods*. *Penghidupan* dikatakan *berkelanjutan* jika ia:

- elastis dalam menghadapi kejadian-kejadian yang mengejutkan dan tekanan tekanan dari luar;
- tidak tergantung pada bantuan dan dukungan luar (atau jika tergantung, bantuan itu sendiri secara ekonomis dan kelembagaan harus *sustainable*);
- mempertahankan produktivitas jangka panjang sumberdaya alam; dan
- tidak merugikan *penghidupan* dari, atau mengorbankan pilihan-pilihan *penghidupan* yang terbuka bagi, orang lain.

- Cara lain untuk mengkonseptualisasi berbagai dimensi *Keberlanjutan* adalah membedakan antara aspek-aspek lingkungan, ekonomi, sosial dan institusional dari sistem-sistem yang *sustainable*.

1.4 Konsep Inti Kerangka Kerja SL

Pendekatan *livelihoods* ini bersifat fleksibel dalam penerapannya, tetapi tidak lantas berarti bahwa prinsip-prinsip intinya harus dikorbankan. Buku ini menggariskan prinsip-prinsip dan menjelaskan mengapa prinsip-prinsip tersebut bisa memberi sumbangan yang cukup berarti bagi keseluruhan nilai pendekatan ini.

1.4.1 People-centred

Pendekatan *livelihoods* menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan. Fokus pada masyarakat ini sama pentingnya baik pada tingkat yang lebih tinggi (ketika membahas pencapaian tujuan-tujuan seperti pengentasan kemiskinan, pembaruan ekonomi atau pembangunan yang berkelanjutan) maupun pada tingkat mikro atau masyarakat (di mana dalam beberapa kasus pendekatan ini sudah jamak digunakan)

1.4.2 Holistik

Pendekatan *SL* berusaha mengidentifikasi hambatan-hambatan paling besar yang dihadapi oleh, dan peluang-peluang yang paling menjanjikan dan terbuka bagi, masyarakat, terlepas dari mana asalnya (misalnya di sektor mana, pada wilayah mana atau tingkat apa, dari lokal sampai internasional). Pendekatan ini dibangun di atas pengertian atau definisi masyarakat sendiri mengenai hambatan dan peluang tersebut dan, bila memungkinkan, pendekatan ini selanjutnya bisa membantu masyarakat membicarakan/menyadari hambatan dan peluang tersebut.

Kerangka kerja *SL* membantu ‘mengelompokkan’ berbagai faktor yang menghambat atau memberi peluang (kesempatan) dan menunjukkan bagaimana hambatan dan peluang itu saling berhubungan satu sama lain. Kerangka kerja ini tidak dimaksudkan menjadi model cara kerja yang baku, tidak juga dimaksudkan bahwa *stakeholders* sendiri perlu mengambil pendekatan sistematis pada pemecahan masalah (*problem solving*).

Sebaliknya, kerangka kerja ini bermaksud menyediakan cara berpikir tentang *livelihoods* yang dapat dikelola dan membantu meningkatkan efektivitas program pembangunan.

1. Kerangka kerja ini bersifat **non-sectoral** dan bisa diterapkan lintas wilayah geografis dan kelompok sosial.
2. Kerangka kerja ini melihat adanya **berbagai pengaruh** yang menimpa masyarakat dan berusaha memahami hubungan antara pengaruh dan dampaknya pada kehidupan.
3. Kerangka kerja ini memperhatikan adanya **berbagai pelaku** (dari pihak swasta sampai kementerian nasional, dari organisasi berbasis masyarakat sampai lembaga pemerintah yang terdesentralisasi yang sedang tumbuh).
4. Kerangka kerja ini melihat adanya **berbagai strategi livelihood** yang diambil masyarakat untuk mengamankan *livelihoods* mereka.
5. Kerangka kerja ini berusaha mencapai **berbagai hasil livelihoods**, yang ditentukan dan dimusyawahkan oleh masyarakat sendiri.

1.4.3 Dinamis

Sebagaimana *livelihoods* masyarakat dan faktor kelembagaan dan struktur yang membentuk/mengkondisikannya adalah sangat dinamis, demikian pula halnya dengan pendekatan ini. Pendekatan ini berusaha memahami dan belajar dari perubahan sehingga bisa mendukung pola-pola perubahan yang positif dan membantu menghilangkan pola-pola yang negatif. Secara nyata pendekatan ini melihat adanya efek-efek pada *livelihoods* yang berasal dari kejadian-kejadian yang mengejutkan di luar masyarakat dan perubahan-perubahan yang lebih bisa diramalkan, meskipun terkadang bersifat merusak. Upaya menangkap dan membangun dinamisme *livelihoods* semacam ini jelas akan menambah lingkup analisis *livelihood*.

1.4.4 Membangun kekuatan dan kapasitas lokal

Prinsip penting dari pendekatan ini adalah ia mulai dengan analisis kekuatan dan kapasitas lokal, bukannya kebutuhan yang perlu disuplai dari luar. Ini tidak berarti bahwa

pendekatan ini meletakkan fokus yang tidak semestinya pada anggota masyarakat yang bernasib lebih baik. Sebaliknya, pendekatan ini menyiratkan pengakuan akan potensi yang melekat pada semua orang, apakah potensi itu berasal dari jaringan kerja sosial mereka yang kuat, akses mereka pada sumberdaya dan prasarana fisik, kemampuan mereka untuk mempengaruhi lembaga-lembaga kunci maupun faktor lain yang berpotensi mengurangi kemiskinan. Dalam upaya pembangunan yang menitikberatkan *livelihoods*, tujuan kuncinya adalah menghilangkan hambatan-hambatan untuk mewujudkan potensi tersebut. Jadi masyarakat akan dibantu agar mereka menjadi lebih berdaya, lebih kuat, dan lebih mampu untuk mencapai tujuan mereka sendiri.

1.4.5 Hubungan makro-mikro

Kegiatan pembangunan cenderung menfokuskan pada tingkat makro *atau* mikro saja. Pendekatan *SL* berusaha menjembatani kesenjangan ini, menekankan pentingnya kebijakan dan institusi tingkat makro bagi pilihan hidup dan penghidupan masyarakat dan perorangan. Pendekatan ini juga menekankan perlunya pengembangan dan perencanaan kebijakan tingkat tinggi yang berasal dari pelajaran-pelajaran dan pemahaman yang diperoleh pada tingkat lokal. Secara simultan hal ini akan memberi peran kepada masyarakat setempat dalam pembuatan kebijakan dan meningkatkan semua efektifitas, walau di sadari bahwa ini adalah tugas yang sulit untuk dilaksanakan.

Banyak kebijakan makro dikembangkan tanpa melibatkan masyarakat yang terkena imbas kebijakan tersebut. Memang benar, pemahaman akan efek-efek dari kebijakan bagi masyarakat (apa yang sebenarnya terjadi, bukannya apa yang diramalkan akan terjadi) dan pemahaman masyarakat akan kebijakan-kebijakan tersebut (proses pembuatan kebijakan itu sendiri) sangat terbatas. Kedua masalah ini perlu dipahami secara lebih baik jika daya guna dan hasil guna dari pendekatan *SL* ingin diwujudkan.

1.4.6 Keberlanjutan

Meskipun kita sering mendengar dan menggunakan istilah ‘pendekatan *livelihoods*’ (yaitu menghapuskan kata ‘*sustainable*’), ide keberlanjutan adalah kunci bagi pendekatan ini. Ide ini tidak boleh diabaikan atau dikesampingkan.

Keberlanjutan mempunyai banyak dimensi. Diringkaskan di sini bahwa keberlanjutan terjadi dengan prasyarat:

- Penghidupan masyarakat bersifat lentur dalam menghadapi kejadian-kejadian yang mengejutkan dan tekanan-tekanan (shocks) dari luar;
- tidak bergantung atau dibuat tergantung pada bantuan dari luar
- mempertahankan produktivitas jangka panjang sumberdaya alam; dan
- tidak merugikan atau merusak sumber-sumber penghidupan, atau pilihan-pilihan penghidupan yang terbuka bagi orang lain.

Dimensi keberlanjutan meliputi berbagai aspek yakni lingkungan, ekonomi, sosial dan kelembagaan.

Keberlanjutan lingkungan dan ekologis tercapai ketika produktivitas sumberdaya alam dan yang menopang kehidupan dilestarikan atau ditingkatkan penggunaannya oleh generasi mendatang.

Keberlanjutan ekonomi dicapai ketika tingkat satuan ekonomi tertentu (rumah tangga) mempertahankan tingkat pengeluaran tertentu secara stabil (pengeluaran sering menjadi proxy indikator dalam menilai kesejahteraan rumah tangga, ketimbang pemasukan karena lebih mudah diukur). Keberlanjutan ekonomi kaum miskin tercapai jika tingkat dasar kesejahteraan ekonomi bisa dicapai dan dipertahankan (pola dasar ekonomi nampaknya tergantung pada situasi khusus, meskipun ia bisa dipahami secara sempit alias *'reductionist'* dengan 'dolar per hari' dari Target Pembangunan Millenium (MDGs).

Keberlanjutan sosial tercapai ketika pengucilan sosial diminalkan dan persamaan sosial dimaksimalkan. Dalam terminologi yang lain, keberlanjutan social bermakna kesenjangan yang ditekan dan *social capital* yang meningkat.

Keberlanjutan kelembagaan tercapai ketika struktur-struktur dan proses-proses yang berlangsung mampu terus menjalankan fungsinya dan berkontribusi secara positif terhadap penghidupan masyarakat dalam jangka panjang.

1.5 Bagaimana Hubungan Kerangka Kerja PSL dengan Pendekatan lain ?

Pendekatan *PSL* masuk ke dalam *landscape* konseptual dan operasional pembangunan. Memahami hubungan antara pendekatan-pendekatan yang berbeda adalah penting, baik untuk menghindari kekacauan maupun untuk meningkatkan lingkup kerjasama. Di sini dijelaskan hubungan PSL dengan pendekatan umum pembangunan yang sudah ada, yaitu: pembangunan partisipatif, pendekatan sektor-luas dan pembangunan desa terpadu.

1.5.1 Pembangunan partisipatif

Pendekatan *livelihoods* hanya akan efektif jika dilaksanakan dengan cara partisipatif. Pendekatan ini memasukkan, dan dibangun di atas, metodologi partisipatif yang sudah ada. Pendekatan ini mendorong tercapainya tujuan-tujuan penghidupan masyarakat oleh masyarakat sendiri.

- a. Pendekatan ini dibangun di atas kekuatan masyarakat. Sekali lagi, hal ini hanya mungkin jika metode/pendekatan partisipatif digunakan untuk menentukan siapa yang mempunyai akses pada jenis *capital* mana dan bagaimana akses ini dipengaruhi oleh lingkungan kelembagaan, sosial dan organisasi.
- b. Pendekatan ini, melalui analisis partisipatif, berusaha memahami efek-efek dari kebijakan makro pada *livelihoods*.
- c. Indikator-indikator dampaknya diharapkan bisa dibicarakan dengan masyarakat setempat. 'Perundingan' ini pengertiannya tidak hanya sebatas partisipasi minimal yaitu sebatas musyawarah saja, melainkan konsensus minimum yang dicapai secara partisipatif seputar pemahaman atas indikator-indikator yang dimaksud.

Pendekatan SL memiliki hubungan yang kuat antara pendekatan *sustainable livelihoods* dengan penilaian kemiskinan partisipatif (PPAs – *participatory poverty assessments*). PPAs ini telah dikembangkan sebagai instrumen yang memasukkan perspektif warga miskin dalam analisis kemiskinan serta dalam rumusan strategis untuk mengatasi kemiskinan tersebut.

Seperti halnya dengan analisis sistim penghidupan, PPAs berakar dalam tradisi riset dan aksi partisipatif. Keduanya mempunyai banyak kesamaan dalam hal tertentu (misalnya

sama-sama menekankan *vulnerability* pada kejadian-kejadian yang mengejutkan dan gejala-gejala serta pada berbagai jenis aset) dan karenanya diharapkan bisa saling melengkapi. Tetapi, karena keduanya berbeda dalam konteks, maka tidaklah mungkin mengemukakan penjelasan yang definitif mengenai hubungan antar keduanya dalam setiap kasus.

1.5.2 Pendekatan sektor-luas (SWAps)¹⁶

Beberapa kalangan menilai bahwa pendekatan sektor luas atau “Sector Wide Approachs” (SWAps) tidak sejalan dengan PSL. Jelas diperlukan penyelidikan lebih lanjut mengenai hubungan antara SWAps dan pendekatan SL, tetapi penilaian di atas nampaknya tidak tepat

SWAps menyoroti pentingnya koordinasi perencanaan strategis dalam mendukung prioritas pemerintah. Ia cenderung dibangun atas dasar komitmen bersama pada mekanisme tunggal – program sektor.

Menurut hemat kami, tidak perlu mempertentangkan antara SWAps dengan pendekatan SL. Pendekatan SL, tidak sebagaimana yang dikhawatirkan oleh sebagian kalangan, tidak serta merta hanya menekankan pada program bantuan akar rumput. Isu-isu kebijakan yang banyak nampak sangat jelas dalam SWAps juga penting dalam pendekatan SL.

Oleh karenanya, kedua pendekatan ini bisa saling melengkapi, SL memberi nilai tambah pada SWAps dengan mendorong dibangunnya hubungan lintas sektoral, partisipatif yang lebih luas oleh stakeholders, pemantauan yang lebih baik terhadap dampak SWAps pada *livelihood* di tingkat lokal serta respon yang lebih besar pada adanya perbedaan-perbedaan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan pendekatan SL boleh jadi terfokus pada satu sektor jika terdapat pemahaman yang memadai mengenai bagaimana sektor tersebut memberi sumbangan bagi penghidupan kaum miskin/marginal. Jika sektor yang dipertanyakan oleh lembaga-lembaga donor dan menghasilkan komponen pemberian

¹⁶ Bila tertarik mempelajari sejarah dan konsepnya, silahkan mengunjungi: <http://www.id21.org/education/4amr1.html>

bantuan yang diprakarsai oleh negara (misalnya pendidikan, kesehatan) SWAPs mungkin adalah cara paling efektif untuk melaksanakan pendekatan SL.

Pendekatan SL dan pendekatan multi sektor atau sektor-luas bersifat saling melengkapi; masing-masing mestinya diperoleh dengan jalan memahami kekuatan yang lain. Analisis livelihoods sangat menekankan pemahaman struktur dan proses yang mempengaruhi akses masyarakat pada aset serta pilihan strategi livelihoods mereka. Ketika hambatan utamanya adalah rendahnya kinerja lembaga-lembaga pemerintah pada tingkat sektoral, maka program bantuan sektor-luas sangat diperlukan. Ini terutama berlaku bagi bidang-bidang yang dikuasai oleh pemerintah seperti kesehatan dan pendidikan.

Program-program sektor-luas akan lebih kaya jika dibangun di atas keterangan informasi yang dikumpulkan dalam analisis sistim penghidupan. Upaya ini akan membantu pihak-pihak yang terlibat dalam memahami interaksi diantara berbagai sektor dan pentingnya mengembangkan hubungan antar sektor untuk memaksimalkan dampak pada tingkat sistim penghidupan (ambang batas kinerja).

Pendekatan *SL* dan kegiatan-kegiatan bantuan yang berasal darinya juga mesti diperoleh dari pelajaran yang didapat dan tujuan yang diupayakan dalam pendekatan sektor. Ini meliputi:

- a. pentingnya memastikan keterlibatan pemerintah setempat dalam proses pembangunan;
- b. perlunya mendasarkan semua bantuan pada prinsip manajemen publik yang paling tepat diterapkan (yaitu tidak melampaui peran pemerintah dengan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dan menekankan pentingnya mengembangkan kemampuan dalam beberapa bidang seperti manajemen keuangan dan penentuan anggaran); dan
- c. nilai koordinasi diantara lembaga- lembaga donor (serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya).

1.5.3 Konsep "Integrated Rural Development"

Salah satu ‘kritik’ awal yang dialamatkan pada pendekatan *livelihoods* adalah bahwa pendekatan ini sangat mirip dengan pendekatan pembangunan desa terpadu (IRD – *integrated rural development*) di tahun 1970-an yang terbukti gagal. Kiranya mudah melihat darimana pemikiran ini berasal; dua pendekatan ini mempunyai banyak kesamaan. Tetapi pendekatan *sustainable livelihoods* diupayakan dibangun di atas kekuatan IRD (terutama mengakui perlunya dukungan luas di wilayah pedesaan) tanpa harus terperangkap dalam jebakan yang menyebabkan kegagalan IRD.

Khususnya, pendekatan *SL* tidak bermaksud menyusun program-program terpadu di wilayah pedesaan. Meskipun mengakui pentingnya pengentasan kemiskinan di pedesaan yang disebabkan oleh berbagai faktor, pendekatan ini hanya menargetkan beberapa wilayah inti saja (dengan bantuan analisis sistem kehidupan yang ada serta proses perencanaan “bawah atas” alias bottom-up) sehingga kegiatan-kegiatannya tetap terkendali.

Tabel 1 Perbandingan Pendekatan “Pembangunan Desa Terpadu” dan “Penghidupan Berkelanjutan”.

	Integrated Rural Development Approach (Tahun 1970-an)	Sustainable Livelihoods Approach (akhir tahun 1990-an)
Titik awal	Struktur, wilayah	Masyarakat serta kekuatan mereka dan kendala yang ada
Konsepsi kemiskinan	Holistik, multi-dimensi Domain rekomendasi menunjukkan keseragaman (penyederhaan pelaksanaan)	Multi-dimensional, kompleks, lokal Memasukkan konsep resiko dan keragaman
Analisis masalah	Dilakukan oleh unit perencanaan dalam waktu singkat, dipandang sebagai finalitas.	Proses dilakukan dengan melibatkan banyak pihak, berulang-ulang dan finalitas merupakan proses.
Lingkup sektoral	Multi-sektoral, rencana tunggal Keterlibatan sektor ditetapkan sejak awal	Multi-sektoral, banyak rencana, Jumlah titik masuk yang sedikit dan keterlibatan sektor berkembang bersama proyek
Tingkat pelaksanaan	Lokal, areal	Pada tingkat kebijakan dan lapangan sekaligus, hubungan yang jelas antara keduanya
Organisasi mitra	Pemerintah pusat dan daerah	Pemerintah pusat dan daerah, LSM, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta
Koordinasi (antar sektor)	Pelaksanaan terpadu (digerakkan oleh donor)	Digerakkan oleh tujuan bersama, manfaat koordinasi ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat
Keberlanjutan	Tidak diperhatikan secara nyata	Dimensi ganda dan menjadi perhatian utama

1.5.4 Memaksimalkan yang positif (sebagai lawan meminimalkan yang negatif)

Pendekatan *SL* menghindari pandangan-pandangan tradisional seperti ‘penghijauan bantuan’. Pandangan-pandangan ini cenderung menitikberatkan pada upaya meminimalkan dampak negatif dari bantuan pembangunan dengan menggunakan penilaian dan *checklist* dampak lingkungan.

Metodologi-metodologi ini penting tetapi terbatas, seringkali mahal dan jarang bersifat partisipatif serta cenderung menekankan keadaan sumberdaya itu sendiri daripada masyarakat dan penghidupan mereka. Sebaliknya, pendekatan *SL* melihat keberlanjutan **multi-sumberdaya (multi-aset)** sebagai unsur integral dari keberlanjutan penghidupan (yang mempunyai banyak dimensi). Pendekatan ini tidak berusaha meminimalkan dampak negatif, tetapi berusaha memaksimalkan sumbangan positif yang berasal dari lingkungan alam bagi hasil-hasil *livelihoods* masyarakat.

1.6 Apa yang beda dari SL?

Pendekatan *SL* bukanlah peluru ajaib, bukan pula cara kerja yang ditentukan secara berbeda sehingga terpisah dari dan bertentangan dengan pendekatan-pendekatan lain. Sebaliknya, ia dibangun di atas pendekatan-pendekatan lain dan pelaksanaan pembangunan terbaik. Pendekatan ini mendorong perlunya mempertanyakan asumsi-asumsi dan memperhatikan konteks yang lebih luas, terutama hubungan makro-mikro. Pendekatan ini juga menuntut dan menekankan analisis lintas-sektoral. Meskipun proyek-proyek dan program-program yang dihasilkan mungkin mempunyai bentuk yang mirip dengan proyek-proyek dan program-program ‘konvensional’, hubungan antara kegiatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan – dicapai melalui perbaikan Keberlanjutan penghidupan – harus jauh lebih jelas, dan karenanya kegiatan-kegiatan tersebut mesti disesuaikan dengan hati-hati.

1.7 Bagaimana Kerangka Kerja ini Digunakan ?

Kerangka kerja ini dimaksudkan menjadi alat serbaguna yang digunakan dalam perencanaan dan manajemen program pembangunan komunitas. Kerangka kerja ini menawarkan cara berpikir tentang *livelihoods* yang bisa membantu menata kompleksitas dan menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi *livelihoods*. Untuk mendapatkan banyak manfaat dari kerangka kerja ini maka:

- a. Ide-ide inti yang menjadi dasar kerangka kerja ini tidak boleh dikorbankan selama proses penyesuaian. Salah satu ide inti adalah bahwa (kebanyakan) analisis mesti dilakukan dengan cara partisipatif.
- b. Penggunaan kerangka kerja ini mesti didukung oleh komitmen yang serius untuk mengentaskan kemiskinan. Upaya ini juga termasuk membangun dialog yang bermanfaat bersama mitra kerja mengenai bagaimana membahas faktor-faktor utama politik dan ekonomi yang justru melestarikan kemiskinan.
- c. Mereka yang menggunakan kerangka kerja ini mesti mempunyai kemampuan untuk mengenali jika terdapat penyimpangan di lapangan, sekalipun elit dan pihak lain mungkin bermaksud menyembunyikan hal ini dan mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri (hal ini menuntut keahlian dan keberanian dalam analisis sosial)

1.8 Pada tahap apa seharusnya SL digunakan?

Pendekatan SL bisa digunakan untuk mengidentifikasi prioritas-prioritas pembangunan dan kegiatan-kegiatan baru. Pendekatan ini juga bermanfaat jika diterapkan untuk meninjau kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung yang tidak dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip SL, membantu mengidentifikasi berbagai masalah seperti fokus yang kurang penting pada output-output fisik (misalnya pohon, jalan, sumur) atau tujuan-tujuan sektoral (misalnya penghasilan, pasar) dengan mengorbankan fokus yang lebih luas pada perbaikan *livelihoods* dan pengentasan kemiskinan.

Dalam proyek/program, pendekatan ini bisa digunakan untuk mempertajam fokus sistem pemantauan dan evaluasi dan dalam pembangunan, mempertajam fokus kerangka logis.

Penggunaan yang lain meliputi riset dan menyediakan struktur pengajaran dan penulisan tentang masalah-masalah pembangunan dan analisis mikro serta analisis sumber daya alam di level mikro.

1.9 Apakah SL relevan di lapangan dan di tingkat kebijakan?

Pendekatan SL bisa digunakan untuk memberikan keterangan mengenai kegiatan baik di lapangan maupun di tingkat kebijakan. Analisis SL menyoroti pentingnya hubungan makro-mikro: bagaimana kebijakan, lembaga dan berbagai lapisan organisasi pemerintah dan non-pemerintah mempengaruhi kehidupan masyarakat dengan berbagai cara, serta sejauh mana masyarakat itu sendiri bisa mempengaruhi struktur-struktur dan proses-proses ini.

Kerangka kerja SL mendorong pemikiran yang menyeluruh mengenai dampak-dampak ini, membantu memahami manakah di antara komponen-komponen khusus *SL* yang paling terkena dampaknya. Pendekatan ini juga mengisyaratkan perlunya analisis lebih lanjut akan faktor-faktor khusus. Perspektif kebijakan dan lembaga yang *'people-centered'* ini sangat penting ketika kita merencanakan perubahan kebijakan dan pembaruan struktural yang pro-warga miskin.

1.10 Mengapa Pendekatan SL?

Lahirnya Pendekatan SL merupakan titik kulminasi atas kritik terhadap pembangunan baik dari sisi hasil, cara maupun ide. Pembangunan cenderung menjadi eksploitatif bukan hanya terhadap sumber daya alam tetapi juga memarginalkan asset-asset dan multi-sumberdaya imaterial yang mendukung keberlanjutan asset penghidupan yang material. Oleh karenanya, pembangunan kerap menegasikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya sosial dan kelembagaan serta sumber daya alam.

Box 1.1. Hubungan Manusia dan Negara

Manusia adalah kekayaan sebenarnya dari negara

Tujuan dasar dari pembangunan adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi masyarakat untuk menikmati hidup yang kreatif, sehat dan lebih lama.

Mungkin ini kelihatannya sebagai sebuah kebenaran yang sederhana.

Tetapi ini sering dilupakan karena perhatian kemudian lebih ditujukan untuk mengakumulasi kekayaan financial dan komoditi”.

(Alinea Pembukaan dari Laporan Human Development Pertama, 1990)

Dalam kenyataannya sampai saat ini tujuan pembangunan sangat dipersempit hanya sebagai proses mengumpulkan kekayaan financial dan komoditas. Pembangunan identik dengan meningkatkan produksi, meningkatkan export yang dijanjikan akan membawa kesejahteraan manusia. Upaya peningkatan produksi, export, dan pendapatan itu kemudian mendorong pembangunan menjadi kendaraan eksploitasi. Manusia didorong untuk mengeksploitasi alam dan juga mengeksploitasi manusia lainnya. Buahnya adalah kehancuran alam dan kehancuran hubungan yang harmoni antar manusia yang pada akhirnya membahayakan kelanjutan kehidupan umat manusia secara keseluruhan.

Jika kita lihat secara spesifik di Indonesia maka gambaran yang kita dapat dari sebuah negara yang kaya sumber daya alam dan sumber daya manusia adalah potret buram. Laporan UN Human Development Index pada tahun 2004 menyebutkan bahwa Indonesia berada pada ranking 112 dari 174 negara anggota Persatuan Bangsa Bangsa. Indonesia yang kaya raya sumber daya alamnya dan besar jumlah penduduknya ternyata justru berada pada kumpulan negara-negara yang tidak mampu mengelola negaranya dengan benar.

Jumlah IDPs (Internally Displaced People) atau pengungsi pada tahun 2002 menurut World Food Program sebanyak 1.3 juta orang¹⁷. Sementara menurut SUSENAS 2003¹⁸ jumlah petani gurem meningkat sebesar 2,4% per tahun sejak tahun 1993 sehingga

17 http://www.wfp.org/country_brief/index.asp?region=5

18 Berita Resmi STATISTIK. No 14/VII/16 Februari 2004

jumlah petani gurem (petani yang memiliki lahan kurang dari 0.5 hektar ataupun tidak memiliki lahan) pada tahun 2003 sebesar 13.7 juta keluarga.

Box 1.2 Laporan Milenium Development Goals Indonesia 2004¹⁹:

- 18,2% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan nasional.
- 7,2% penduduk Indonesia hidup dengan pendapatan < \$1 per hari.
- 27.3 % BALITA bergizi buruk.
- 64.6% penduduk mengkonsumsi kalori di bawah yang direkomendasikan
- Kematian BALITA sebesar 46 orang diantara 1000 orang BALITA
- Kematian Ibu Melahirkan 357 diantara 100.000
- 50% punya akses ke sumber air yang baik.
- 63.5% punya akses ke sanitasi yang baik
- 28.3% perempuan bekerja di sektor non pertanian.

Laju kerusakan hutan Indonesia menurut WWF sekitar 1.9 juta hektar pertahun. Bahkan di tahun 2007, menjadi negara penghasil emisi gas rumah kaca khususnya CO₂ ketiga terbesar di dunia setelah USA dan China.²⁰ Daerah pantai dan pedesaan merupakan kantong dimana penduduk miskin tinggal. Ironisnya ditengah indikator kemiskinan yang begitu menggetarkan kebijakan dibangun masih belum dalam tujuan untuk meningkatkan kemanusiaan manusia secara utuh tetapi justru masih terjebak dengan tujuan yang terutama menguntungkan investor (mengundang investasi), mengamankan anggaran belanja negara (pembayaran hutang dan gaji aparatur misalnya DPR, DPRD, dsbnya) dengan cara mengurangi anggaran untuk pelayanan publik (misalnya pendidikan, kesehatan). Ditengah kemiskinan yang semakin tidak manusiawi kita juga masih melihat kecenderungan meningkatnya angka penjualan mobil mewah, mall, dan barang-barang mewah lainnya, yang menggambarkan jurang antara orang yang kaya dengan yang miskin semakin melebar (tingkat inequality).

1.11 Kelahiran Pendekatan Sustainable Livelihood

Kritik terhadap pembangunan yang sangat exploitatif tersebut sebenarnya sudah mulai banyak dilontarkan sejak tahun 1970-an dan kemudian pada tahun 1980an kritik

19 UN-BAPPENAS. Indonesia Progress Report on the Millennium Development Goals. February, 2004.

20 Lihat Peace Working Paper, March 2007 berjudul "Indonesia and Climate Change"

mengencang soal marginalisasi masyarakat miskin dari proses pembangunan. Respon dua dekade kemudian adalah lahirnya Agenda 21 tentang pembangunan berkelanjutan²¹ dimana disebutkan bahwa pembangunan harus mampu menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi kemampuan masyarakat dimasa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Livelihood adalah istilah pembangunan yang menggambarkan kemampuan (*capabilities*), kepemilikan sumber daya (sumber daya sosial dan material), dan kegiatan yang dibutuhkan seseorang/masyarakat untuk menjalani kehidupannya.

Livelihood akan berkelanjutan (*sustainable*) jika penghidupan yang ada memungkinkan orang/masyarakat untuk menghadapi dan pulih dari tekanan dan guncangan, memungkinkan orang/masyarakat untuk mengelola dan menguatkan kemampuan (*capabilities*) dan kepemilikan sumber daya (*assets*) untuk kesejahteraannya/masyarakat saat ini (sekarang) maupun masyarakat/kehidupan dimasa mendatang, serta tidak menurunkan kualitas sumber daya alam yang ada.

Pendekatan Sustainable Livelihood (PSL) adalah cara berpikir dan bekerja untuk pembangunan yang berkembang secara evolusi dan dalam tujuan untuk mengefektifkan segala usaha-usaha mengakhiri kemiskinan. Sebagai sebuah pendekatan PSL didukung oleh seperangkat prinsip-prinsip dan alat-alat yang menggambarkan cara mengorganiser, memahami, dan bekerja menangani issue-issue kemiskinan yang kompleks dan beragam, dimodifikasi dan diadaptasi menyesuaikan diri terhadap prioritas dan situasi lokal.

PSL berkembang baik karena adanya banyak kontribusi yang diberikan oleh berbagai pekerja pembangunan yang berasal dari berbagai organisasi yang berbeda termasuk: lembaga riset (seperti IDS²²), NGOs (misalnya CARE dan Oxfam), Organisasi multi dan bilateral dan donor (misalnya World Bank, SIDA, UNDP dan DFID) dan dalam konteks Indonesia ada Circle Indonesia, Hivos SEA dan mitra SED-nya, dan sebagainya.

21. Agenda 21 merupakan agenda yang disepakati oleh para petinggi dunia yang hadir dalam World Summit for Sustainable Development yang diadakan di Rio de Janeiro, Brazil, pada tahun 1992. Pemerintah Inggris mulai serius mengimplementasikan pendekatan ini dengan memperkenalkan Pendekatan *Sustainable Livelihood* yang draft pertamanya secara luas diperkenalkan pada tahun 1997. Pendekatan ini dipergunakan oleh *Department for International Development* (DFID)-UK untuk mengimplementasikan program program pembangunannya di seluruh dunia.

²² Bagian dari University of Sussex yang mengelolah www.livelihoods.org dan www.eldis.org

Tabel 1.2. Prinsip-Prinsip Pendekatan Sustainable Livelihood dan bentuk prakteknya

Prinsip	Praktek
Berpusat pada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Memfokuskan pada masyarakat bukan kepada apa yang mereka hasilkan - Memahami apa yang terjadi pada masyarakat, dan memahami perbedaan yang terjadi antara masyarakat yang berbeda kegiatannya. - Bekerja dengan masyarakat dengan cara yang merefeksikan livelihood mereka sekarang dan kekuatan mereka dan kemampuannya untuk adaptasi (bukan cuma problem mereka)
Berfokus pada kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus pada kemiskinan dan pengurangan kemiskinan - Memahami apa arti kemiskinan dari perspektif orang miskin dan perbedaan antara berbagai tipe masyarakat miskin. - Memahami siapa yang paling miskin dan menemukan cara untuk bekerja dengan mereka.
Responsive dan participatory	<ul style="list-style-type: none"> - Mengedepankan pandangan dan kebutuhan dari sudut pandang orang miskin (bukan pandangan dan kebutuhan dari organisasi dan pengambil keputusan yang bekerja untuk kemiskinan) - Menyediakan bagi orang luar proses yang memungkinkan mereka untuk mendengar dan merespon orang miskin
Menyeluruh, multi level dan multi sektoral	<ul style="list-style-type: none"> - Mengedepankan kompleksitas dari kemiskinan, melibatkan banyak dimensi dan sektor (tidak hanya satu dimensi dan sektor) - Mengedepankan pentingnya jaringan (linkages) antar level (mikro-meso-makro) dan antara institusi dan sektor yang berbeda (bukan cuma peran-peran individual mereka) - Memahami dan peduli atas strategi livelihood orang miskin yang kompleks dan beraneka ragam. - Memahami dan menyelesaikan pengaruh yang beraneka ragam dari berbagai level dan sektor yang berbeda yang mempunyai dampak terhadap livelihood orang miskin.
Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> - Bekerja dengan pemerintah, publik, sektor swasta, dan donor
Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Bekerja hingga terjadi keseimbangan secara ekonomi, institusi, sosial dan lingkungan. Keberlanjutan livelihood didalam menghadapi guncangan dan perubahan (bukan kelayakan sementara)
Dinamis	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami kedinamisan dari faktor-faktor yang mempengaruhi livelihoods (kondisi ini tidak pernah statis). - Belajar dari perubahan dan memasukkan perubahan ke dalam intervensi pembangunan. - Merespon secara fleksible perubahan di dalam kehidupan masyarakat dan membangun komitmen yang lebih panjang.
Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengakui dan memahami kebutuhan dari mereka mereka yang termarginalisasi dari proses pembangunan misalnya perempuan, klas yang tidak diuntungkan, orang tua, anak muda, dsbnya - Memasukkan kebutuhan orang-orang yang termarginalisasi ke dalam pembangunan. - Mengakui dan memahami level yang berbeda dari kemiskinan dan menyeimbangkan dukungan kepada kelompok yang relatif paling miskin dan mereka yang rentan menjadi miskin. - Mengakui, memahami dan menyelesaikan dampak jelek dari intervensi pembangunan terhadap kelompok kelompok lain.
Hak	<ul style="list-style-type: none"> - Mengakui dan menyertakan secara fundamental hak-hak amsyarakt di segala aspek pembangunan, penelitian, perencanaan dan intervensi, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> • Menjamin kebutuhan dasar dari kelompok yang paling tidak diuntungkan. • Memperhatikan bentuk, level, kualitas, dan waktu dari partisipasi. • Menjamin bahwa kerahasiaan individu diperhatikan. • Menjamin kerahasiaan informasi yang diberikabn oleh orang miskin. • Menyertakan kebutuhan dan praktek budaya dan agama.

1.12 Prinsip dan Praktek – Bagaimana mereka digunakan

Pendekatan SL meng-asumsikan bahwa pendekatan pembangunan akan semakin efektif jika didasari atas: (1) Pemahaman yang sistematis atas kemiskinan dan penyebabnya; (2) Pandangan lintas setoral, pandangan yang lebih luas tentang peluang pembangunan, dan bagaimana ini berhubungan dengan aspirasi dan prioritas masyarakat. (3) Penempatan masyarakat (aspirasi dan prioritas) sebagai pusat perumusan analisis dan tujuan. Detailnya bisa dibaca pada table 1.2

1.13 Penggunaan Pendekatan Sustainable Livelihood

PSL dapat digunakan untuk beberapa tujuan yang berbeda misalnya:

- Sebagai alat- kerangka kerja SL dapat digunakan sebagai *checklist* ataupun alat untuk menginventaris issue, masalah, kapasitas, perspektif, konteks kelembagaan dan struktur untuk menganalisis kehidupan masyarakat. Alat yang memotret realitas dari berbagai titik pandang (kiri-kanan, atas-bawah) dan berbagai dimensi.
- Sebagai tujuan- panduan untuk meningkatkan keberlanjutan penghidupan komunitas di kampung, di mana perumusannya tidak dimonopoli oleh ‘yang berkuasa’ semata.
- Sebagai seperangkat prinsip- yang dapat digunakan disetiap situasi atau jika menjadikan sebuah program kerja berperspektif SL. Tidak dimaksudkan untuk terjebak dalam orientasi proyek semata, tetapi prinsip yang memandu mencapai tujuan penghidupan berkelanjutan.
- Sebagai pendekatan – kombinasi kerangka kerja SL dan prinsip untuk memandu pembangunan sehingga terjadi perbaikan kualitas penghidupan.

KONSEP KERANGKA PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN

Kerangka kerja ini menempatkan masyarakat sebagai fokusnya, dalam artian membangun relasi subyek-subyek, atau yang direduksi dalam istilah *people-centered* di mana komunitas yang miskin (dianggap/diasumsikan atau dipersepsikan miskin), merupakan subyek yang pengalamannya kami (tentunya juga sebagai subyek), bagikan dalam kerangka konseptual yang selanjutnya disebut sebagai kerangka atau pendekatan Penghidupan Berkelanjutan. Membangun relasi “subyek-subyek” merupakan sebuah ‘*positioning*’ sikap kesetaraan yang diambil penulis secara sadar untuk menghindari sikap ‘sok tahu’ atau ‘dominasi’ wacana terhadap kaum yang sudah diposisikan marginal dalam ranah bahasa: kaum miskin.

Kerangka kerja ini hendaknya tidak dipahami secara sempit alias linier dan tidak dimaksudkan menyuguhkan model realitas yang rigid. Tujuannya adalah membantu para pihak yang mempunyai perspektif yang berbeda untuk terlibat dalam debat elegan dan padu mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi penghidupan (atau *livelihoods* yang kami gunakan secara bergantian dalam buku ini), arti penting dari, serta hubungan (*interplay*) antara faktor-faktor tersebut. Upaya ini, pada gilirannya, mesti membantu dalam mengidentifikasi jenis intervensi program pembangunan yang tepat di komunitas.

Dalam menjelaskan kerangka di bawah ini, satuan utama yang dipakai sebagai contoh analisis adalah sebuah rumah tangga di pedesaan tapi juga bisa diperluas pada satuan komunitas tertentu (desa, dusun, kampung/mukim dan sebagainya).

Titik berangkat (*starting point*) dalam menganalisis konteks dan sistem penghidupan komunitas dengan kerangka penghidupan berkelanjutan (PSL) tidak harus dimulai dari

'platform penghidupan' (kolom paling kiri Gambar 2.1) yang menyajikan kategorisasi aset atau sumber daya (manusia, alam/lingkungan, fisik/infrastruktur, financial dan social capital) yang kemudian diikuti dengan analisis konteks kerentanan (atau konteks yang merentankan – Gambar 2.1 kolom 3).

Terimplikasikan di dalam "strategi penghidupan" (kolom 4 Gambar 2.1) di mana suatu keluarga sebagai satu unit sosial yang diamati memilih untuk mengkombinasikan berbagai aktivitas berdasarkan penggunaan dan kepemilikan aset dan konteks perubahan yang dihadapinya

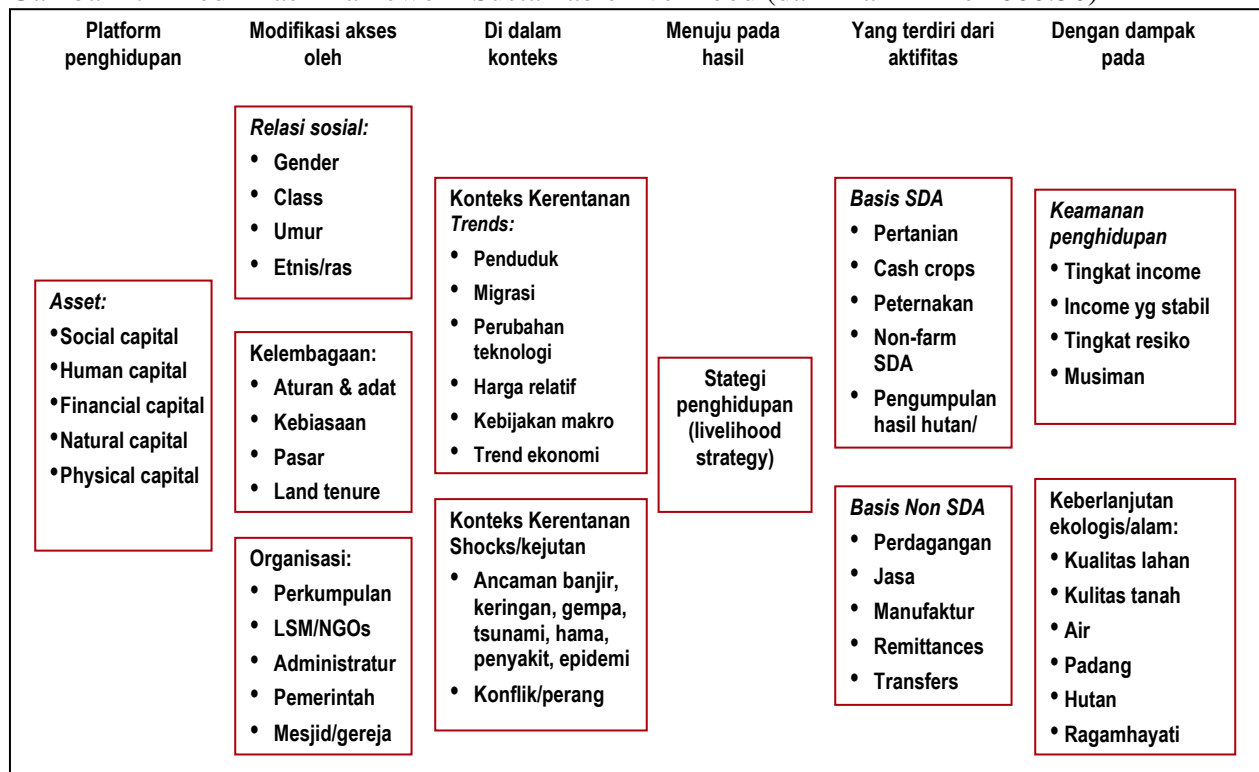
Tafsiran terhadap Gambar 2.1 adalah *bahwa* penghidupan masyarakat dibentuk atau ditopang oleh berbagai kekuatan dan faktor yang beragam yang dengan sendirinya terus berubah yang dimiliki oleh masyarakat. Analisis yang *subyek-subyek* dimulai dengan penyelidikan secara simultan terhadap aset-aset (sering juga disebut *capital aset*, modal dasar atau sumber daya majemuk) masyarakat, analisis *hasil-hasil capaian* penghidupan yang mereka dapatkan) dan *strategi-strategi penghidupan* yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dirumuskan ideal (kolom 6 gambar 2) yakni tercapainya kondisi yang aman (contoh: pangan dan pendapatan).

Umpan balik penting adalah antara: struktur dan proses yang berubah (kolom 2) dan konteks kerentanan (kolom 3). *Sedangkan kolom 5 merupakan aktifitas-aktifitas* yang mentransformasi aset-aset yang difasilitasi ataupun dihambat oleh struktur dan proses dalam konteks risiko yang dinamis (kolom 3).

Gambar 2.1 memberikan inspirasi lanjutan bahwa dalam konteks rumah tangga dan konteks pedesaan, tidak ada strategi tunggal yang menjamin keberlanjutan penghidupan sebuah komunitas, karena tiap keluarga (KK) yang berbeda memiliki strategi penghidupan yang berbeda yang merupakan fungsi dari aset tertentu yang dimilikinya serta akses atas aset tersebut. Yang perlu diketahui bahwa untuk edisi ini, pembahasan soal dan seputar interaksi individu dalam KK tidak dibahas secara detail, walaupun disadari bahwa menganggapnya sebagai kesatuan yang homogen tidak sepenuhnya benar, dan karenanya tidak sepenuhnya salah.

Pesan yang lebih kuat dari ilustrasi Gambar 2.1 adalah bahwa suatu unit keluarga atau komunitas tertentu melangsungkan hidup dan penghidupannya dengan bertumpu pada berbagai asset yang dimilikinya atau yang secara materil dan imaterial melekat pada unit dimaksud. Aset tersebut meliputi modal sosial, modal manusia (SDM), modal finansial ekonomi, modal sumber daya alam dan lingkungan serta modal fisik infrastruktur. Tetapi akses pada modal-modal (*capital assets*) tersebut kerap dimodifikasi oleh peran relasi sosial (seperti gender, kelas ekonomi, umur, etnisitas, agama/ras), pengaruh kelembagaan (aturan, adat, kebiasaan, pasar) dan organisasi (seperti LSM/INGOs, administratur dan pemerintah dalam arti luas, lembaga agama seperti mesjid dan gereja dan organisasi keagamaan dalam arti luas) yang berada dalam konteks kerentanan (meliputi kejutan seperti bencana alam dan perang/konflik, maupun tren seperti krisis ekonomi, harga yang fluktuatif, pertumbuhan penduduk dan masalah kependudukan serta perubahan teknologi dan kebijakan makro).

Gambar 2.1 Modifikasi Framework Sustainable livelihood (dari Frank Ellis 2000:30)



Beranjak dari konteks tersebut, strategi penghidupan suatu unit keluarga/unit komunitas di desa/pedesaan terdiri dari berbagai aktifitas yang dibagi dalam dua kategorisasi yakni aktifitas penghidupan berbasis sumber daya alam (seperti pertanian, peternakan,

perikanan, komoditas, hasil hutan non-kayu dan berbagai *cash crops* lainnya) dan aktifitas non-SDA seperti perdagangan, jasa, industri dan manufaktur, transfer dan remittance dengan dampak pada capaian keamanan penghidupan seperti tingkat *income* yang stabil, resiko yang berkurang dan capaian keberlanjutan ekologis yakni kualitas tanah, hutan, air serta keragaman hayati yang terpelihara.

2.1 Aset Penghidupan – Capital Asset/Pentagon Aset

Pendekatan penghidupan berkelanjutan mengandaikan pertama-tama dan terutama menaruh perhatian pada kekuatan masyarakat. Sama sekali bukanlah romantisme belaka karena masyarakat atau komunitas manusia telah hidup dalam skala waktu yang panjang dengan bergantung pada sumber daya yang ada disekitarnya, turun temurun.

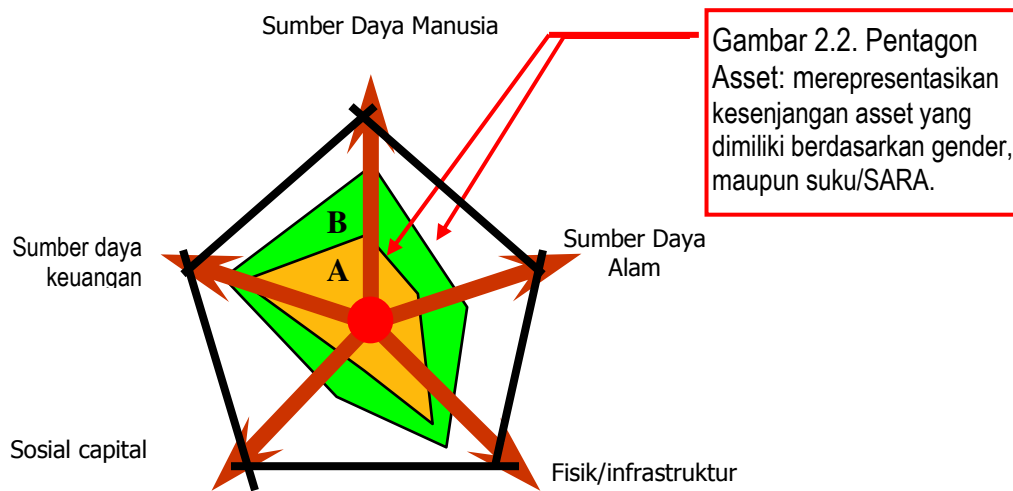
Pendekatan ini dibangun dengan keyakinan bahwa masyarakat membutuhkan sejumlah aset untuk mencapai hasil-hasil livelihoods yang positif. Tidak cukup hanya sejenis aset untuk mencapai hasil-hasil penghidupan yang jumlahnya banyak dan berbeda-beda tersebut. Apalagi bagi warga miskin/marginal yang aksesnya pada *capital* aset cenderung sangat terbatas. Sebagai akibatnya mereka harus mencari cara untuk memperoleh dan menggabungkan berbagai aset yang benar-benar mereka miliki dengan cara yang inovatif guna mempertahankan hidup.

Kekuatan seseorang/masyarakat ditentukan oleh besar/kecilnya, keragaman, dan keseimbangan antar aset. Misalnya orang/komunitas yang hanya memiliki uang banyak tetapi tidak memiliki aset kekerabatan maka akan hidup didalam komunitas yang tidak aman. Keluarganya dan dirinya mungkin terancam hidupnya, atau jika dia atau keluarganya menghadapi bencana maka tidak ada dari kerabatnya yang akan membantunya.

Satu jenis aset misalnya bisa bermakna ganda, artinya bisa sekaligus menjadi aset tangible dan intangible. Misalnya memiliki tanah atau sapi misalnya di beberapa komunitas tertentu akan juga meningkatkan status sosial (aset tangible) sehingga perannya didalam proses pengambilan keputusan di masyarakat semakin meningkat.

Pemahaman akan asset sangat berguna untuk menyusun *entry points* yang sesuai untuk membangun proses pemenuhan kebutuhan dari kelompok sosial yang berbeda, dan juga

untuk menggali lebih jauh kemungkinan melakukan pertukaran antara aset-aset yang berbeda. Keseimbangan antar aset sendiri merupakan ke khasan komunitas tertentu yang mengakibatkan betapa pentingnya kepekaan untuk menggambarkan keakuratan penggambaran aset yang dimiliki. Pada umumnya kita tidak bisa, bahkan seharusnya tidak melakukan penyeragaman ukuran untuk komunitas yang berbeda untuk menunjukkan perbandingan langsung antara aset-aset tersebut. Tentu saja, hal ini tidak lantas menafikan upaya menentukan indikator-indikator aset yang khusus dan bisa diukur ketika hal itu dianggap berguna.

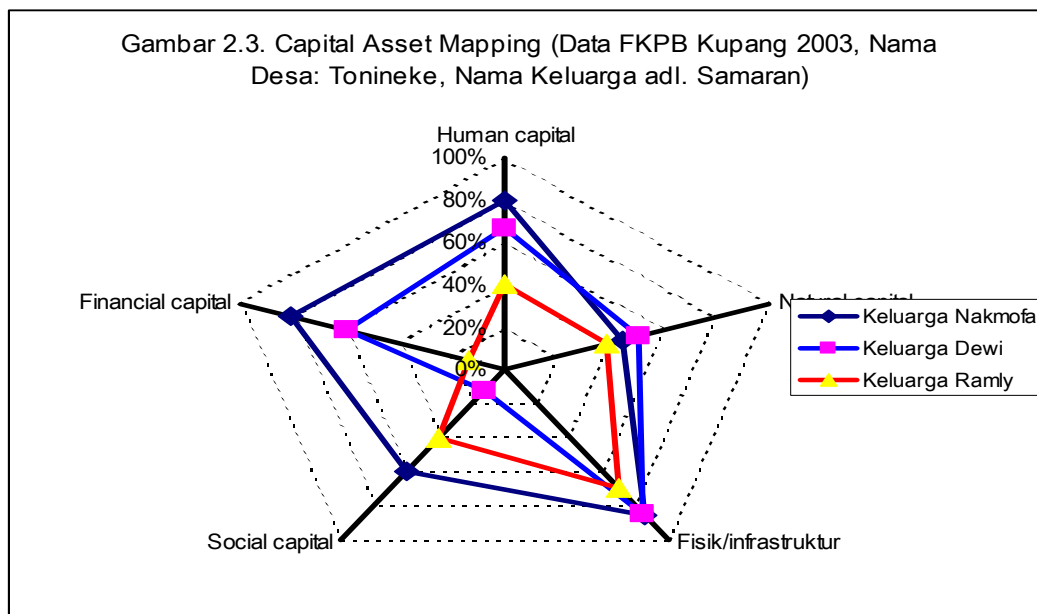


Ambisi pendekatan ini adalah berupaya sebisa mungkin akurat dan realistis untuk melihat kekuatan-kekuatan masyarakat (aset/sumber daya/ modal) dan bagaimana mereka berusaha mentransformasi kekuatan-kekuatan tersebut menjadi aktifitas yang menghasilkan hasil atau capaian-capaian penghidupan yang berkelanjutan. Bahwa masyarakat membutuhkan sejumlah aset yang ditransformasi dalam kegiatan-kegiatan untuk mencapai hasil-hasil livelihoods (penghidupan) yang positif.

Kekuatan (sumber daya) atau aset yang dimiliki antar keluarga dalam sebuah desa ataupun antara individu dalam keluarga tidaklah homogen, karenanya aktifitas/kegiatan pun berbeda beda menuju pada capaian dan hasil penghidupan yang berbeda-beda. Istilah 'miskin' itu sendiri dalam konteks kekinian bisa dipahami sebagai capaian atau hasil

penghidupan yang dicapai hingga ‘saat ini’ yang diindikasikan oleh penguasaan/ kepemilikan/akses atas aset atau sumber daya atau capital/modal yang terbatas. Contoh Gambar 2.2 bagian A atau gambar 2.3 bagian Ramli.

Pada tingkatan yang paling kasat mata, kaum miskin atau yang dipersepsikan miskin dalam kenyataannya memiliki capital asset yang sangat terbatas. Sebagai akibatnya mereka harus mencari cara untuk memperoleh dan memaksimalkan penggabungan aset-aset yang benar-benar mereka miliki dengan cara yang inovatif guna mempertahankan hidup. Dalam pentagon asset (Gambar 2.2), kaum miskin terwakilkan pada daerah arsiran A, yang secara kasat mata, memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan skala yang paling kecil, kepemilikan sumber daya alam yang juga lebih sedikit, akses pada sumber daya finansial dan infrastruktur yang kecil dan juga social capital yang kecil.



Sedangkan daerah arsiran B pada Gambar 2.2, mewakili keluarga tertentu pada desa yang sama di mana B memiliki aset penghidupan yang lebih baik dalam ke lima aspek capital asset. Bila keluarga tertentu memiliki skala yang penuh (sempurna) dalam capital asset, maka bisa disimpulkan bahwa keluarga tersebut sangat kaya.

Bentuk segi lima (pentagon) ini bisa digunakan untuk menunjukkan perbedaan akses masyarakat pada aset-aset dengan klasifikasi detail pada table 2.1. Titik pusat segi lima,

di mana garis-garis bertemu, menunjukkan akses nol pada aset-aset, sementara batas luar menunjukkan akses maksimum pada aset-aset. Atas dasar ini, segi lima dengan bentuk yang berbeda bisa dibuat bagi masyarakat lainnya atau kelompok-kelompok sosial lain dalam masyarakat.

Lazimnya, satu aset sumber daya alam bisa menghasilkan keuntungan ganda. Jika orang mempunyai akses yang aman pada tanah atau lahan (*natural capital*) mereka sangat mungkin juga terfasilitasi untuk mendapatkan *financial capital*, karena mereka bisa menggunakan tanah atau lahan tersebut bukan hanya untuk kegiatan produksi (pertanian) sendiri semata tetapi juga bisa disewakan.

Demikian pula halnya, hewan ternak bisa memfasilitasi social capital (simbol kehormatan, alat tukar social dalam pernikahan/ kedukaan) bagi pemiliknya dan pada saat yang sama bisa digunakan sebagai alat yang produktif untuk mengerjakan sawah dan dibiakan untuk tabungan siaga (yang sewaktu-waktu bisa dicairkan menjadi *financial capital*) dan dengan sendirinya tetap menjadi *natural capital*.

Untuk mengembangkan pemahaman akan hubungan-hubungan yang kompleks ini, kiranya perlu melihat apa yang terjadi di balik aset-aset itu sendiri, memahami praktik-praktik budaya yang berjalan dan jenis-jenis struktur dan proses-proses yang ‘mengubah’ aset-aset tersebut menjadi hasil-hasil livelihoods.

Tabel 2.1 Ilustrasi Pemeringkatan Kekayaan Menurut Masyarakat 2 Desa di Timor Barat (Sumber: Dokumentasi Pemetaan Pangan Partisipatif, PMPB 2007, diolah Penulis).

Nama Desa	Kaya	Sedang	Miskin	Klasifikasi Capital
Kolbano dan Toineke	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki lahan > 2.ha Akses pakai lahan > 2.5 h.a Memiliki tanaman umur panjang sedikit Akses pada air banyak (sumur permanent, aman banjir) Pohon pisang 500 rumpun Singkong 500 pohon 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki lahan < 1.ha Akses pakai lahan > ± 1.5ha Memiliki tanaman umur panjang sedikit Akses pada air sedang (sumur tdk permanent, rentan banjir) Pohon pisang 200an rumpun Singkong 200an pohon 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki lahan < 0.25ha Akses pakai lahan > 2.5 h.a Memiliki tanaman umur panjang sedikit Akses pada air sedikit/ tidak punya sumur Pohon pisang < 50 rumpun/tidak ada Singkong < 50 pohon 	Natural Capital
	<ul style="list-style-type: none"> Hasil panen jagung 100 kuda/ tahun Penjualan asam banyak Punya motor (ojek) Ternak : Sapi 10-30 ekor, Babi 25 ekor, Kambing 20 ekor Pendapatan dalam 1 Tahun Rp.12.000.000 Tabungan > dua juta Hasil kacang hijau > 200 kg 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil panen jagung 50 kuda/ tahun Penjualan asam sedang Tidak punya motor/ bisa ojek Ternak : Sapi 5-9 ekor, Babi 10-24 ekor, Kambing 10-19 ekor Pendapatan dalam 1 Tahun Rp. 5.000.000 Tabungan 1 juta Hasil kacang hijau 200 kg 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil panen jagung 20 kuda/ tahun Penjualan asam sedikit Tidak punya motor/ tidak bisa ojek Ternak : Sapi 1-4 ekor, Babi 1-9 ekor, Kambing 1-9 eokr Pendapatan dalam 1 Tahun < Rp. 3.000.000 Tidak ada tabungan Hasil kacang hijau <100 kg/tahun 	Financial Capital
	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan salah satu anggota kk > D3-S1 Jarak ke Puskesmas dekat/ ada transportasi Semua anggota kk sehat Memiliki banyak ketrampilan berusaha 	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan > SMP/SMA Jarak ke Puskesmas dekat/ ada transportasi Ada anggota kk yg sering sakit biasa Memiliki ketrampilan berusaha sedang 	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan SD/tidak sekolah Ke Puskesmas jauh/ tak ada kendaraan/ Ada anggota yg sakit penyakit menular Tidak atau sedikit ketrampilan berusaha 	Human Capital
	<ul style="list-style-type: none"> Jalan desa berbatu tidak dilalui angkutan umum Pasar kecamatan jauh ditempuh dg jalan kaki Rumah permanen 	<ul style="list-style-type: none"> Jalan desa berbatu tidak dilalui angkutan umum Pasar kecamatan jauh ditempuh dg jalan kaki Rumah semi permanen 	<ul style="list-style-type: none"> Jalan desa berbatu tidak dilalui angkutan umum Pasar kecamatan jauh ditempuh dg jalan kaki Rumah sementara beratap daun 	Fisik/Infrastruktur Capital
	<ul style="list-style-type: none"> Banyak kerabat bisa diandalkan saat krisis Anggota gereja dan memiliki peran penting Punya kedudukan adat penting di kampung 	<ul style="list-style-type: none"> Ada kerabat yg bisa diandalkan saat krisis Anggota gereja dan sedikit memiliki peran Kedudukan adat sedang 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada pihak yg diandalkan saat krisis Anggota gereja pasif Tidak memiliki pengaruh adat 	Sosial Capital

